

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masy Maju dan Sejahtera”

“Energi Baru Anambas Maju”



RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN KUTE SIANTAN

Tahun **2025 - 2029** *Tokong Belayar*



Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025



0822-5809-0507



Pos-el Kute Siantan@anambaskab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan periode 2025–2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis bagi seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Kute Siantan dalam mewujudkan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik yang berkualitas, serta pengelolaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Rancangan Akhir Renstra ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, sekaligus memperhatikan potensi lokal dan aspirasi masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan di kawasan perbatasan.

Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui masukan, ide, maupun data yang relevan. Harapan kami, Rancangan Akhir Renstra ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mengoptimalkan potensi Kecamatan Kute Siantan sekaligus menghadapi tantangan yang ada selama 5 (lima) tahun mendatang. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi langkah awal dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Terpilih dan diselaraskan dengan Visi dan Misi Kecamatan Kute Siantan.

Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan yang telah ditetapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Tujuan Kecamatan Kute Siantan dapat tercapai dalam membangun daerah dikawasan perbatasan.

Payalaman, 04 September 2025

Pt. CAMAT KUTE SIANTAN,

YUEJANA, S.Pi
Penata Tk. I/III.d
NIP. 197808312002122007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	13
1.3 Maksud dan Tujuan	19
1.4 Sitematika Penulisan	21
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	25
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	25
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	31
2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD (Capaian SPM & Tufoksi)	38
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	44
2.5 Kelompok Sasaran layanan	46
2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	46
2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	47
2.8 Isu Strategis	51
2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	53
2.10 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	56
2.11 Telahaan Renstra K/L dan Renstra	64
2.12 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	68
2.13 Penentuan Isu-isu Strategis atau Potensi Daerah	78
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	93
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	95
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	100
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	108
4.1 Uraian Program dan Kegiatan	108
4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	116
4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	118
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	120
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	120
BAB V	
PENUTUP	1263



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan	32
Tabel 2. 4	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	33
Tabel 2. 5	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Kelamin	33
Tabel 2. 6	Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Jabatan	34
Tabel 2. 7	Sumber Daya Aparatur PPPK	36
Tabel 2. 8	Sarana dan Prasarana Pendukung	37
Tabel 2. 9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas	40
Tabel 2. 10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan	43
Tabel 2. 11	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	54
Tabel 2. 12	Perbandingan Visi dan Misi Kepala Daerah dan RPJMD	60
Tabel 2. 13	Persandingan Janji Politik dan Program Perangkat Daerah	61
Tabel 2. 14	Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD KKA Tahun 2025-2029	88
Tabel 3. 3	Tujuan dan Sasaran Renstra PD	102
Tabel 3. 4	Penahapan Renstra PD	103
Tabel 3. 5	Arah Kebijakan Renstra PD	105
Tabel 3. 6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	106
Tabel 4. 2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	112
Tabel 4. 3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	117
Tabel 4. 4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	118
Tabel 4. 5	Indikator Kinerja Utama (IKU)	120
Tabel 4. 6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	122



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	
Hubungan antar dokumen	12
Gambar 2. 1	
Struktur Organisasi Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas	31
Gambar 2. 3	
Kondisi PNS Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025	32
Gambar 3. 1	
Konsep Kinerja Renstra Perangkat Daerah	99
Gambar 3. 2	
Kerangka Keterikatan Sasaran RPJMD-Tujuan Renstra Perangkat Daerah ..	99
Gambar 4. 1	
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	111



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah selama lima tahun. Penyusunan Renstra dilakukan sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan pentingnya sinergi antara perencanaan jangka menengah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Perencanaan adalah proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pembangunan adalah Suatu upaya untuk melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat (proses perubahan ke arah yang lebih baik). Perencanaan Pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kabupaten, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pembentukan Daerah Otonomi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah Daerah berupaya mewujudkan kesejahteraan dimaksud melalui penyelenggaraan pembangunan daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan Nasional dengan memperhatikan karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah.

Kecamatan Kute Siantan merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang unik. Sebagai kecamatan yang didominasi oleh wilayah kepulauan, Kecamatan Kute Siantan menghadapi tantangan dalam aksesibilitas, distribusi layanan, dan pengembangan ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya perencanaan strategis yang terarah dan berkelanjutan untuk memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Desa yang ada di kecamatan.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, Kecamatan Kute Siantan juga menghadapi perubahan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal maupun nasional. Perkembangan teknologi, tuntutan pelayanan publik yang lebih baik, dan kebutuhan akan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, perencanaan strategis ini dirancang untuk menjawab tantangan



sekaligus memanfaatkan peluang yang ada demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Kecamatan Kute Siantan melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2029 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2026. Selanjutnya, RENSTRA Bappeda Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai tindak lanjut dari mandat perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kute Siantan periode 2025–2029 menjadi dokumen penting yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program prioritas kecamatan



untuk 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai panduan bagi seluruh perangkat kecamatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien.

Dalam penyusunannya, Rancangan Akhir Renstra ini mengedepankan prinsip partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kecamatan, pemangku kepentingan, hingga masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Potensi lokal Kecamatan Kute Siantan, seperti sektor Industri, Kesehatan, perikanan, pariwisata bahari, dan kearifan lokal, menjadi keunggulan yang harus dioptimalkan. Namun, potensi ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap pasar, dan risiko perubahan iklim. Renstra ini diharapkan mampu menjadi dokumen strategis yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga memberikan solusi yang konkret dan berkelanjutan untuk pembangunan kecamatan.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kecamatan Kute Siantan dapat bekerja sama secara sinergis dalam mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra ini juga diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi upaya bersama dalam menghadirkan perubahan positif yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas secara keseluruhan.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan merupakan bentuk Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute



Siantan merupakan bentuk secara partisipatif sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun sebagai instrumen untuk mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: (1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah; (2) rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan (3) rencana pembangunan tahunan. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan dokumen perencanaan



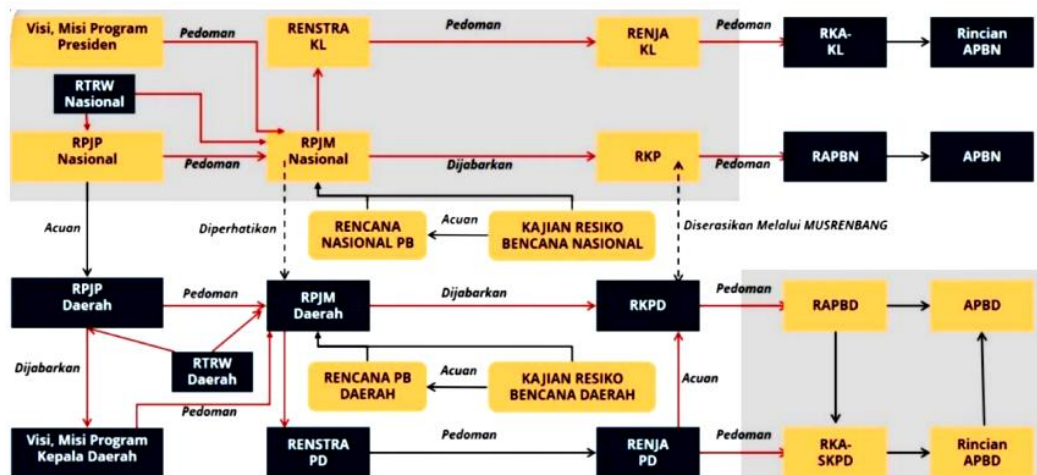
teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kute Siantan yang merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Akhir, penyusunan Rancangan Akhir kerja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan, dan penetapan. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan berfungsi untuk menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas serta dokumen yang terkait, seperti RTRW, Rancangan Akhir Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri, Rancangan Akhir Rencana Strategis Provinsi Kepulauan Riau, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala perangkat daerah merumuskan kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis perangkat daerah. Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.



Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Kute Siantan dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 serta rencana pelayanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Secara operasional Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029 mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029 dilaksanakan simultan dan bersinergi dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029.

Gambar 1. 1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem. Keterkaitan dan keselarasan antara



komponen perencanaan pembangunan baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi menegaskan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem.

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan merupakan satu kesatuan yang terintergrasi dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu dokumen RKPD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya sampai dengan proses penyusunan RAPBD. Dengan disusunnya Rancangan Akhir Renstra ini, diharapkan Kecamatan Kute Siantan dapat semakin memperkuat perannya sebagai Fasilitator, Koordinator dan penggerak Utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukhtahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Surat Menteri Dalam Negeri 000.8.2.2/4075/Bangda Tentang Penyusunan Rancangan Akhir Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan



- Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019 Nomor 73);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
 29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 89);
 30. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Tahun 2023-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 96);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
 33. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2045



- (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024);
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 104);
 35. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;
 36. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 37. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 813);
 38. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 266 Tahun 2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025-2029 (Lampiran XXIX Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2025 Nomor 266 Tanggal 27 Maret 2025).



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rancangan Akhir Renstra 2025-2029 adalah tersusunnya pedoman pembangunan Kecamatan Kute Siantan pada khususnya dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya tahun 2025-2029 sebagai penjabaran Visi dan Misi Bupati Kepulauan Anambas 2025-2030.

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan periode 2025–2029 memiliki maksud utama sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi acuan bagi pemerintah kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini dirancang untuk memberikan arah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberdayakan masyarakat, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi wilayah secara efektif dan efisien.

Maksud Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai Dokumen Induk dalam perencanaan Program dan Kegiatan bagi Kecamatan Kute Siantan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan;
2. Sebagai Dokumen teknis pembangunan yang berkelanjutan dan dijadikan pegangan untuk memahami tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kute Siantan dalam jangka menengah atau 5 (lima) tahun periode pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan utama penyusunan Renstra ini adalah untuk menyelaraskan visi dan misi Kecamatan Kute Siantan dengan



kebijakan pembangunan di tingkat Kabupaten Kepulauan Anambas. Hal ini bertujuan agar setiap program kerja kecamatan dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Renstra ini juga bertujuan untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

Secara khusus, penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen panduan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas Kecamatan Kute Siantan selama lima tahun ke depan.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan potensi wilayah yang dapat dijadikan dasar dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan.
3. Meningkatkan sinergi antara pemerintah kecamatan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan.
4. Membangun sistem perencanaan yang akuntabel dan transparan guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Mendorong implementasi program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.
6. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja;
7. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan yang fokus, terarah, dan terintegrasi.



8. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025–2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta berpedoman juga pada Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah dan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun dengan Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan



1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam bab ini memuat data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Data dan Informasi yang disajikan dianalisa dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Memuat juga Struktur organisasi Kecamatan Kute Siantan, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Kecamatan Kute Siantan periode sebelumnya dan menjelaskan hambatan-hambatan yang masih dihadapi dan perlu solusi pemecahan permasalahan.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah (Capaian SPM dan Tufoksi)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

2.8 Isu Strategis

2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi



2.10 Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

2.11 Telahaan Renstra K/L dan Renstra

2.12 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.13 Penentuan Isu-isu Strategis atau Potensi Daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan pada akhir periode perencanaan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan PD dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan tentang Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerja Penyelenggaraan berdasarkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah



4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana pelaksanaan tindakannya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Kute Siantan memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kecamatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan umum di wilayahnya. Tugas ini mencakup koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebijakan dan program prioritas daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Kute Siantan menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan

Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas pemerintahan desa serta menyelaraskan program kerja dengan kebijakan daerah.

2. Pelayanan Publik



Menyelenggarakan layanan administratif kepada masyarakat, termasuk penerbitan dokumen kependudukan, perizinan tertentu, dan pelayanan lainnya.

3. Pelaksanaan Pembangunan

Memfasilitasi pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat serta memastikan keberlanjutannya sesuai dengan perencanaan daerah.

4. Pengelolaan Keuangan dan Aset

Mengelola anggaran kecamatan serta aset yang dimiliki dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan diatas, bentuk Susunan Organisasi Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan **Tipe B** terdiri dari :

1. **Camat**

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian malalui Sekretaris Daerah bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara Struktural Camat berada langsung dibawah Bupati.

Camat juga berperan sebagai kepala Wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan diwilayah Kecamatan, khususnya tugas-



tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah diwilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya diwilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala Instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas Instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Secara Filosofis, Kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana dan prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan dari 2 (dua) sumber yaitu bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pimpinan kecamatan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Camat mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan



pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang sosial dan kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan;
- i. pelaksanaan penatausahaan Kecamatan dan fungsinya.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.



Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- c. pengendalian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengoordinasian penyusunan program dan laporan seksi-seksi;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Membantu camat dalam koordinasi administrasi, yang terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada kecamatan.

- b. Sub Bagian Keuangan;

Sub Bagian Program melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan,



evaluasi dan laporan dari masing-masing seksi pada kecamatan.

c. Sub Bagian Perencanaan.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada kecamatan.

3. Seksi-seksi Teknis

Melaksanakan tugas-tugas teknis kecamatan, yang meliputi:

a. Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Tata Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;

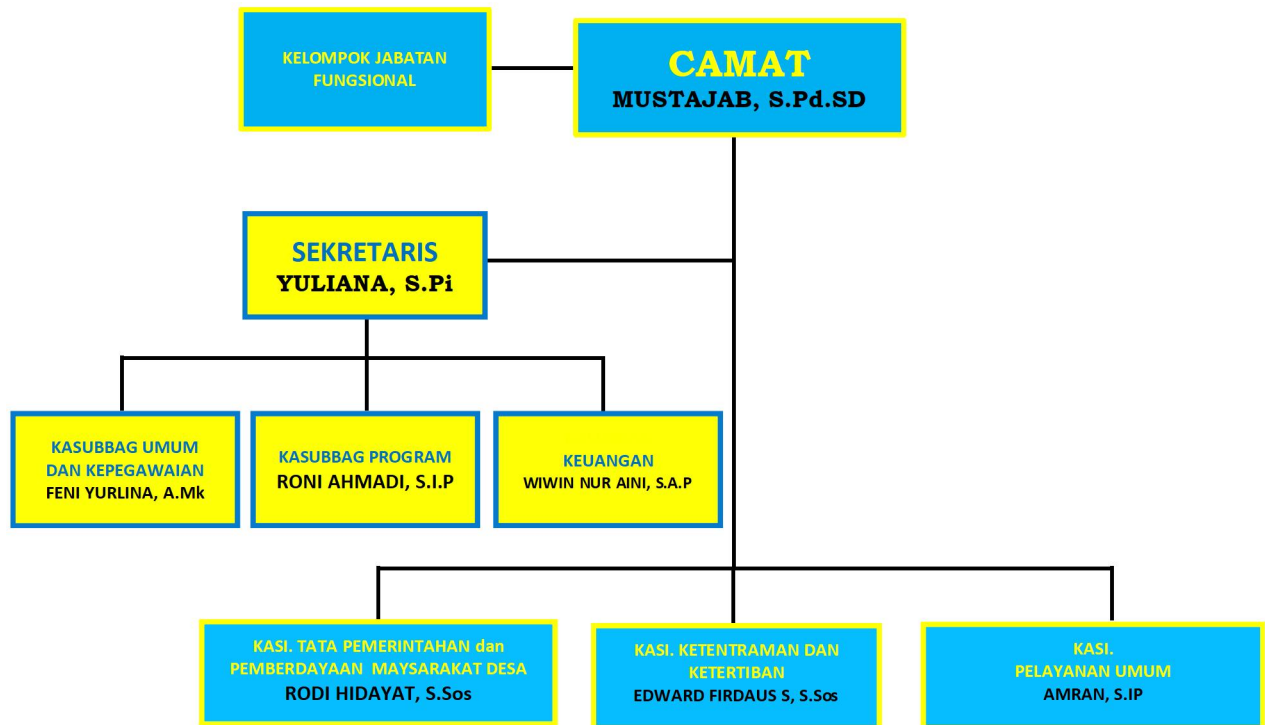
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Seksi Pelayanan Umum;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Gambar 2. 1

Struktur Organisasi Kecamatan Kute Siantan



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Adapun Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kute Siantan Per Desember 2024 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang terdiri dari 14 (empat belas) Pegawai Negeri Sipil dan 34 Pegawai Tidak Tetap. Pada Bulan Januari 2025 Sumber Daya Aparatur Kecamatan Kute Siantan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari 13 (tiga belas) Pegawai Negeri Sipil dan pada Bulan Juni dan Oktober 2025 terdapat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang. Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut :

1. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

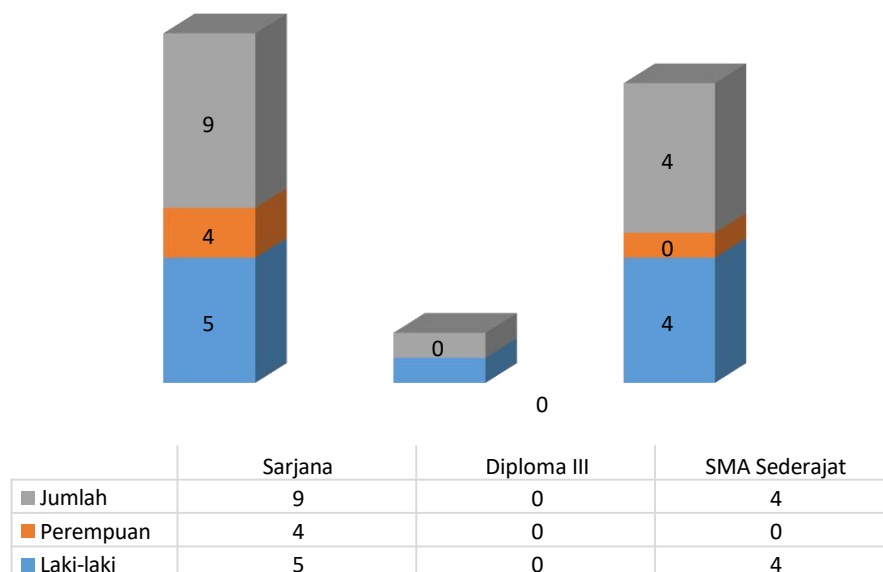


Adapun komposisi Pegawai Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Sumber Daya Aparatur
Berdasarkan Kualifikasi Golongan dan Jabatan

No	Pangkat/Golongan	Eselon/Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pembina Tk. I	Eselon III.a	1 Orang
2.	Penata Tk. I	Eselon IV.a	4 Orang
3.	Penata Tk. I	Eselon IV.b	1 Orang
4.	Penata Muda Tingkat I	Eselon IV.b	1 Orang
5.	Penata Muda	Eselon IV.b	1 Orang
6.	Penata Muda	Pelaksana	2 Orang
7.	Pengatur Tingkat I	Pelaksana	2 Orang
8.	Pengatur	Pelaksana	1 Orang
9.	PPPK	Pelaksana	33 Orang
Jumlah			46 Orang

Gambar 2. 3
Kondisi PNS Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025





a. **Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan**

Adapun komposisi pegawai Kecamatan Kute Siantan tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2. 4
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Sumber Daya Aparatur	Kualifikasi Pendidikan	
(1)	(2)	(3)	
1.	ASN : 13 Orang	S1	: 9 Orang
		SMA/SMK	: 4 Orang
2.	PPPK : 33 Orang	S1	: 14 Orang
		D4	: - Orang
		D1	: - Orang
		SMA/SMK	: 19 Orang
		NON PENDIDIKAN	: - Orang
Jumlah		46 Orang	

b. **Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin**

Sumber Daya Aparatur berdasarkan kelamin yang ada pada kantor Kecamatan Kute Siantan didominasi kaum laki-laki yang terdiri dari ASN dan tenaga honor, berikut ini sumber daya aparatur ASN dan tenaga honor berdasar kelamin.

Tabel 2. 5
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Kelamin

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
ASN/PNS	9	4
PPPK	19	14
Jumlah	28	18



Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan elemen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah, termasuk di Kecamatan Kute Siantan.

Adapun Sumber daya Manunisia (SDM) Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan Pegawai Sipil Negara Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2. 6
Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jabatan

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MUSTAJAB, S.Pd.SD NIP. 198603101993031011	Pembina Tk. I IV.b	Camat
2.	YULIANA, S.Pi NIP. 197808312002122007	Penata Tk. I III.d	SekCam
3.	FENI YURLINA, S.Kep NIP. 198102172005022003	Penata Tk. I III.d	Kasubbag Umpeg
4.	RONI AHMADI, S.I.P NIP. 198505222011011001	Penata Muda Tk.I III.b	Kasubbag Program
5.	WIWIN NUR AENI, S.A.P NIP. 197612202010012009	Penata Tk. I III.d	Kasubbag Keuangan
6.	RODI HIDAYAT, S.Sos NIP. 198207062010011017	Penata Tk. I III.d	Kasi Tapem dan PMD
7.	EDWARD F S, S.Sos., M.M NIP. 198201072010011015	Penata Tk. I III.d	Kasi Tranrib
8.	AMRAN, SIP NIP. 198101252010011010	Penata Tk. I III.d	Kasi Pelayanan Umum
9.	HADRIATI, S.I.P NIP. 198304122010012020	Penata Muda III.a	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
10.	YUDIRIANTO NIP. 198110102006041022	Penata Muda III.a	Pengadministrasi Perkantoran
11.	SYAHRIL NIP. 198309092011011003	Penata Muda III.a	Pengadministrasi Perkantoran
12.	WARDANY NIP. 198708062011011001	Penata Muda III.a	Pengadministrasi Perkantoran
13.	IS SUGIANTO NIP. 198409202010011011	Pengatur Tk. I II.d	Pengadministrasi Keuangan



Namun, saat ini terdapat tantangan yang signifikan terkait distribusi ASN yang belum merata di seluruh unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ulang agar ASN dapat terdistribusi dengan baik sesuai kebutuhan tugas, pokok, dan fungsi yang bersifat koordinatif. Penataan ini juga harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan ASN yang bertugas didominasi oleh lulusan minimal tingkat Sarjana dari berbagai disiplin ilmu. Dengan demikian, pelaksanaan tugas dapat berjalan secara seimbang dan efisien, mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Selain itu, dalam menghadapi kebutuhan sumber daya aparatur yang terus meningkat, perekrutan ASN menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam lima tahun mendatang. Jumlah ASN yang terbatas saat ini menuntut adanya kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang direncanakan pada tahun 2025. Perekrutan PPPK ini diharapkan mampu mengisi kebutuhan tenaga kerja yang mendesak, terutama pada unit kerja yang membutuhkan tenaga ahli. Selain itu, aspek kesetaraan gender juga tetap menjadi perhatian, mengingat proporsi aparatur perempuan saat ini sudah cukup memadai. Dengan memastikan keterwakilan gender yang proporsional, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.



Tabel 2. 7
Sumber Daya Aparatur PPPK

No	Nama	NIP	Jabatan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	EFENDI, ST	19820912 202521 1 008	Pelaksana
2.	RONI, S.T	19921112 202521 1 019	Pelaksana
3.	ROBI, S.Sos	19920311 202521 1 025	Pelaksana
4.	PURNIA NIKA, S,Sos	19940513 202521 2 028	Pelaksana
5.	ANDI, S.Kom	19930514 202521 1 027	Pelaksana
6.	YUSNITA WATI, S.Kom	19941210 202521 2 029	Pelaksana
7.	MUHAMMAD FARIZKI, S.H	19950309 202521 1 017	Pelaksana
8.	WAN MARLENA, S.Sos	19941111 202521 2 036	Pelaksana
9.	AZRIADI, S.Sos	19920717 202521 1 014	Pelaksana
10.	HARDI PUTRA, S.Sos	19950628 202521 1 010	Pelaksana
11.	ZANARIIAH, S.P		Pelaksana
12.	FENI, S.Sos	19941010 202521 1 030	Pelaksana
13.	JAMALUDIN	19810310 202521 1 031	Pelaksana
14.	TETI HARNITA	19810907 202521 2 006	Pelaksana
15.	HENDRI	19820609 202521 1 018	Pelaksana
16.	AMIYATI	19750304 202521 2 006	Pelaksana
17.	SEPRIAWATI	19850903 202521 2 016	Pelaksana
18.	SYARIP HIDAYAT	19690404 202521 1 012	Pelaksana
19.	WAN MUHAMMAD RAKAS	19990805 202521 1 004	Pelaksana
20.	WAN AZZRULLOH	20001012 202521 1 003	Pelaksana
21.	TRISNAWATI, SE	-	Pelaksana
22.	KAMARUDIN	-	Pelaksana
23.	RIA KARTIKA	-	Pelaksana
24.	DENSI SISWANDI	-	Pelaksana
25.	SAHRIPUDIN	-	Pelaksana
26.	KARMILA	-	Pelaksana
27.	RAHAYU	-	Pelaksana
28.	DIANA SAFITRI	-	Pelaksana
29.	ISMAWATI	-	Pelaksana
30.	PAJRIANA	-	Pelaksana
31.	ELI RAYUNI	-	Pelaksana
32.	AZRIWANDI	-	Pelaksana
33.	ANIZAR	-	Pelaksana



Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kute Siantan juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, Kecamatan Kute Siantan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 8
Sarana dan Prasarana Pendukung

No	Uraian	Jumlah	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Laptop Asus	3 Unit	2020
2.	P.C Lenovo	3 Unit	2020
3.	Mesin Ketik Listrik	1 Buah	2020
4.	Meja Kerja Kayu Lokal	6 Buah	2020
5.	A.C Window Panasonic	3 Buah	2020
6.	Soundsystem	1 Unit	2020
7.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	2020
8.	Meja Tamu Biasa Lokal	1 Buah	2020
9.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1 Buah	2020
10.	Kursi Pejabat Lainnya Politron	1 Buah	2020
11.	Sepeda Motor Aeroax 155	1 Unit	2020
12.	Kipas Angin Visalux	2 Unit	2020
13.	Printer Epson	1 Unit	2020
14.	Kursi Putar Lokal	6 Buah	2020
15.	Kursi Hadap Polaris	15 Buah	2020
16.	Laptop Asus	4 Unit	2021
17.	P.C Lenovo	3 Unit	2021
18.	Sepeda Motor Honda PCX150	1 Buah	2021
19.	Lemari Kayu Lokal	6 Buah	2021



20.	Filing Cabinet Besi Lokal	6 Buah	2021
21.	Alat Penghancur Kertas Micro Cut	3 Buah	2021
22.	Meja 1/2 Biro Lokal	1 Buah	2021
23.	Meja 1/2 Biro Lokal	1 Buah	2021
24.	Panggung Ringging	1 Unit	2021
25.	Kipas Angin Sekai	6 Unit	2021
26.	Televisi Politron	2 Unit	2021
27.	Printer Epson	4 Unit	2021
28.	Printer Brother	1 Unit	2021
29.	Papan Pengumuman Lokal	2 Buah	2021
30.	Kursi Eselon Lokal	6 Buah	2021
31.	Mesin Pemotong Rumput Yamamex	2 Buah	2021
32.	Lemari Es Politron	1 Buah	2021
33.	Tangga Aluminium	3 Buah	2021
34.	Camera Sony	1 Buah	2021
35.	Alat Studio Lainnya	1 Unit	2021
36.	Kursi Rapat Predator	50 Buah	2022
37.	Laptop Asus	3 Unit	2023
38.	Printer Epson	3 Unit	2023
39.	Kursi Hadap Predator	70 Buah	2023

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Kute Siantan terus berupaya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari komitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan administratif seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, dan layanan informasi publik dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kecamatan Kute Siantan juga mengembangkan pendekatan yang berbasis teknologi informasi, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, Kecamatan Kute Siantan aktif dalam membina dan mendampingi desa-desa di wilayahnya untuk mendukung



pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti kegiatan jemput bola untuk pengurusan dokumen, telah menjadi salah satu langkah inovatif untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Dengan dukungan SDM yang kompeten dan sinergi antara perangkat kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat, Kecamatan Siantan menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam Kute mendukung terciptanya pelayanan yang berkualitas dan inklusif.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, kinerja yang telah dihasilkan secara umum adalah tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahunan. Disamping itu capaian kinerja lainnya yang merupakan pendukung perencanaan antara lain: Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dan Kecamatan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah dan Kecamatan, dan Evaluasi Program dan Kegiatan Pembangunan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan pada periode 2021-2026, yaitu:



Tabel 2. 9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kute Siantan
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)						(7)						(8)					
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	B (60,10)	CC (51,56)	B (60,10)	B (63,15)	B (67)	B (69)	BB (71)	CC (51,56)	CC (51,56)	CC (51,56)	CC (51,56)	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	A (86)	B (81,29)	B (82)	B (83)	A (86)	A (86,5)	A (87)	B (81,29)	B (81,29)	B (81,29)	B (81,29)	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
3.	Persentase Desa Berkembang menuju Desa Mandiri	-	-	20%	-	-	20%	40%	60%	100%	20%	20%	20%	30%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-
4.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-



Kinerja Kecamatan Kute Siantan terus menunjukkan perkembangan positif dalam berbagai aspek pelayanan publik dan pembangunan wilayah. Berdasarkan data indikator kinerja, Indeks Reformasi Birokrasi tetap bertahan secara konsisten dari kategori CC (51,56) pada tahun 2021 menjadi CC (51,56) pada tahun 2024, dengan proyeksi mencapai BB (71) pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) juga mengalami kepuasan, dari kategori B (81,29) pada tahun 2021 menjadi B (81,29) pada tahun 2024, dengan proyeksi mencapai A (87) pada tahun 2026, menunjukkan keberhasilan Kecamatan Kute Siantan dalam memberikan pelayanan yang memenuhi harapan masyarakat.

Dalam mendukung pembangunan desa, Kecamatan Kute Siantan telah menargetkan peningkatan persentase desa berkembang menuju desa mandiri, yang dimulai pada tahun 2021 dengan capaian awal sebesar 20% sehingga meningkat menjadi 30% pada tahun 2024 dan direncanakan mencapai 100% pada tahun 2026. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan tetap menjadi prioritas utama, dengan target partisipasi mencapai 100% setiap tahun hingga tahun 2026. Data ini menggambarkan komitmen Kecamatan Kute Siantan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi yang kuat dalam setiap program pembangunan, sehingga mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan wilayah secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, pelaksanaan perencanaan pembangunan telah berjalan dengan baik, dengan pencapaian yang tinggi dalam penyediaan dokumen perencanaan dan konsistensi perencanaan tahunan. Namun, masih terdapat tantangan dalam peningkatan konsistensi penganggaran serta optimalisasi pelayanan dan birokrasi, termasuk dalam implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan serta



penerapan inovasi daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran serta mendorong inovasi berbasis riset yang lebih aplikatif di tingkat daerah.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kute Siantan, yaitu:



Tabel 2. 10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Kecamatan Kute Siantan Kab. Kepulauan Anambas

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	ANGGARAN																					
		Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)	
		Target	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi	Target	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi	Target	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Indikator	Target	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Indikator	Target	Pagu	Realisasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Indikator	Target	Pagu
(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	100 %	Rp 4.006.118.428	Rp 3.157.105.118	78.81%	100 %	Rp 3.760.450.240	Rp 3.748.273.255	99.68%	100 %	Rp 3.676.899.471	Rp 3.573.634.140	97.19%	100 %	Rp 3.762.430.107	Rp 3.128.002.159	83.14%	100 %	Rp 3.886.044.777	Rp 389.957.643	10.03%	100 %	Rp 4.012.075.284
UNSUR KEWILAYAHAN																							
KECAMATAN																							
KECAMATAN KUTE SIANTAN																							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 %	100 %	Rp 116.937.400	Rp 12.885.000	11.02%	-	Rp -	Rp -	#DIV/0!	100 %	Rp 7.591.200	Rp -	0.00%	100 %	Rp -	Rp -	#DIV/0!	-	Rp -	Rp -	#DIV/0!	100 %	Rp 241.247.700
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100 %	100 %	Rp 445.917.900	Rp 316.848.400	71.06%	100 %	Rp -	Rp -	#DIV/0!	100 %	Rp 528.686.254	Rp 502.995.800	95.14%	100 %	Rp 167.973.477	Rp 156.707.000	93.29%	100 %	Rp 139.357.688	Rp -	0.00%	100 %	Rp 482.122.600
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	100 %	Rp 34.277.300	Rp 3.415.500	9.96%	-	Rp -	Rp -	#DIV/0!	100 %	Rp 43.560.000	Rp 17.340.000	39.81%	100 %	Rp 20.077.090	Rp 7.230.000	36.01%	100 %	Rp 30.018.100	Rp -	0.00%	100 %	Rp 239.996.200
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	100 %	Rp 114.674.000	Rp 12.967.000	11.31%	100 %	Rp 25.907.500	Rp 25.907.500	100%	100 %	Rp 37.572.400	Rp 31.060.000	82.67%	100 %	Rp 59.261.200	Rp 52.260.000	88.19%	100 %	Rp 90.169.000	Rp -	0.00%	100 %	Rp 140.440.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	100 %	Rp 68.335.500	Rp 42.167.000	61.71%	100 %	Rp 17.794.000	Rp 17.794.000	100%	100 %	Rp 57.346.300	Rp 45.695.500	79.68%	100 %	Rp 75.758.164	Rp 50.192.500	66.25%	100 %	Rp 38.767.438	Rp -	0.00%	100 %	Rp 86.946.450
TOTAL KESELURUHAN	100 %	100 %	Rp4,786,260,528	Rp3,545,388,018	74.07%	100 %	Rp 3,804,151,740	Rp3,791,974,755	99.68%	100 %	Rp4,351,655,625	Rp4,170,725,440	95.84%	100 %	Rp4,085,500,038	Rp3,394,391,659	83.08 %	100 %	Rp4,184,357,003	Rp389,957,643	9.32 %	100 %	Rp 5,202,828,234

Page 1

NO	TAHUN ANGGARAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			JUMLAH		
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		88.11%			1.00%			6.95%			0.96%			1.70%			1.28%			100.00%		
1	2021	4.006.118.428	3.157.105.118	0.79	117.037.400	12.885.000	0.11	445.917.900	316.848.400	0.71	34.277.300	3.415.500	0.10	114.674.000	12.967.000	0.11	68.335.500	42.167.000	0.62	4.786.355.528	3.545.388.018	74.07%
2	2022	3.760.450.240	3.748.273.255	1.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	25.907.500	25.907.500	1.00	17.794.000	17.794.000	1.00	3.804.151.740	3.791.974.755	99.68%	
3	2023	3.676.899.471	3.573.634.140	0.97	7.591.200	0.00	0.00	528.686.254	502.995.800	0.95	43.560.000	17.340.000	0.40	37.572.400	31.060.000	0.83	57.346.300	45.695.500	0.80	4.351.655.625	4.170.725.440	95.84%
4	2024	3.762.430.107	3.128.002.159	0.83	0.00	0.00	#DIV/0!	167.973.477	156.707.000	0.93	20.077.090	7.230.000	0.36	59.261.200	52.260.000	0.88	75.758.164	50.192.500	0.66	4.085.500.038	3.394.391.659	83.08%
5	2025	3.886.044.776	389.957.643	0.10	0.00	0.00	#DIV/0!	139.357.688	0.00	0.00	30.018.100	0.00	0.00	90.169.000	0.00	0.00	38.767.438	0.00	0.00	4.184.357.002	389.957.643	9.32%
6	2026	3.896.331.460	0.00	0.00	135.182.400	0.00	0.00	530.286.616	0.00	0.00	123.234.500	0.00	0.00	117.232.854	0.00	0.00	76.097.100	0.00	0.00	4.878.364.930	0.00	0.00%
JLH		22,988,274,482.50	13,996,972,315.00	0.61	259,811,000.00	12,885.000.00	0.05	1,812,221,935.00	976,551,200.00	0.54	251,161,990.00	27,985,500.00	0.11	444,816,954.00	122,194,500.00	0.27	334,098,502.22	155,849,000.00	0.47	26,090,384,863.72	15,292,437,515.00	58.61%
		PAGU ANGGARAN																				
		REALISASI ANGGARAN																				
		SISA PAGU ANGGARAN																				
		REALISASI ANGGARAN PERCENT																				

Page 1



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tugas pokok dan fungsi utamanya kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Kecamatan Kute untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Hal ini juga disinkronkan antara peluang dan tantangan yang ada di tingkat nasional maupun provinsi. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan.

1. Tantangan

Tantangan merupakan situasi yang berupa ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi di masa depan. Tantangan Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

- a. Cepatnya perubahan lingkungan eksternal yang membawa implikasi pada fleksibilitas perencanaan di daerah.
- b. Belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan.
- c. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem perencanaan, penganggaran evaluasi dan pelaporan.
- d. Permasalahan akurasi, kebaruan data, dan integrasi data untuk perencanaan dan evaluasi kinerja dalam satu sistem terpadu.



- e. Terbatasnya kajian yang dimanfaatkan sebagai basis pengambilan kebijakan dan perencanaan.
- f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat.
- g. Belum optimalnya SDM perencana dengan kualitas dan kompetensi yang memadai untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan.

2. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Peluang dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai berikut:

- a. Adanya koordinasi yang baik antara *stakeholder* untuk penyediaan data yang dibutuhkan.
- b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang benar dibutuhkan dalam pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.
- c. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.



2.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan aspek pelayanan yang diberikan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang menjadi target pelayanan atau kelompok sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Unsur Pimpinan (Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah) Pelaporan data dan Kondisi kependudukan, Pelayanan dan hal-hal yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan wilayah Kecamatan Kute Siantan.
2. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas dalam hal pelaporan dan pemberian informasi kepada instansi/unit kerja terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kute Siantan.
3. Pemangku kepentingan dalam hal menjaring aspirasi dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan serta penyediaan informasi pembangunan.
4. Pemerintah Desa dan masyarakat serta organisasi masyarakat yang berada di Wilayah Kecamatan Kute Siantan.

2.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Kute Siantan.
3. Perusahaan Migas yang beroperasi di Wilayah Kecamatan Kute Siantan.

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu juga pada Pasal 225



ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 6 yang menjelaskan bahwa Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.

Sebagai salah satu wilayah administratif di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Kute Siantan memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pelayanan publik, membina pemerintahan desa, dan mendukung pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kute Siantan dihadapkan pada berbagai tantangan yang berkaitan dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi masyarakat. Permasalahan yang ada seringkali menjadi hambatan dalam mencapai kinerja pelayanan yang optimal dan keberhasilan program pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi secara mendalam untuk memahami permasalahan yang muncul dan isu strategis yang perlu ditangani.

2.7 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan terdapat permasalahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut. Permasalahan ini dikarenakan adanya benturan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi riil di lapangan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat maka Kecamatan Kute Siantan merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi



maupun pelayanan kependudukan yang melibatkan pihak Kecamatan tersebut, tentunya ditemui berbagai permasalahan-permasalahan yang perlu diidentifikasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung keberhasilan pembangunan di wilayahnya, Kecamatan Kute Siantan perlu memahami secara mendalam berbagai permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Identifikasi permasalahan menjadi langkah penting untuk mengungkap kendala-kendala yang muncul baik dari aspek internal maupun eksternal. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah. Dengan pendekatan yang berbasis data dan analisis yang komprehensif, Kecamatan Kute Siantan dapat menyusun langkah strategis yang efektif untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan. Berikut disampaikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Kute Siantan, sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam Pelayanan Administrasi Publik

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik maka Kecamatan Kute Siantan harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, akurat, berdasarkan prosedur serta aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Masih belum optimalnya pelayanan terhadap masyarakat ini disebabkan SDM aparatur yang masih terbatas dari segi kuantitas dan kualitas serta terbatasnya sarana, prasarana



dan anggaran.

- Kurangnya Aksesibilitas Layanan di Wilayah Terpencil
Wilayah geografis yang sulit dijangkau menyebabkan masyarakat di desa-desa terpencil mengalami keterbatasan akses terhadap layanan administrasi seperti penerbitan dokumen kependudukan dan perizinan.
- Minimnya Pemanfaatan Teknologi Informasi
Sistem pelayanan berbasis digital belum sepenuhnya diterapkan, sehingga proses pelayanan masih bergantung pada metode manual yang memakan waktu dan kurang efisien.
- Ketidacukupan Fasilitas Pelayanan
Beberapa fasilitas pendukung seperti kantor pelayanan, perangkat komputer, dan jaringan internet belum memadai untuk mendukung operasional yang optimal.

2. Permasalahan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Lambatnya peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat.
Peranan fungsi kelembagaan dimasyarakat belum optimal ini disebabkan telah terjadinya Kurangnya koordinasi masyarakat ke kantor camat untuk dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang menyangkut kelembagaan masyarakat.
- Kurangnya Kapasitas Aparatur Desa
Sebagian aparatur desa belum memiliki pemahaman dan keterampilan yang cukup dalam mengelola pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan administrasi.



- Koordinasi yang Belum Optimal
Sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa belum berjalan maksimal, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan yang membutuhkan kolaborasi intensif.

3. Permasalahan dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat:

Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan kemasyarakatan Peran serta dan swadaya masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang belum optimal ini disebabkan telah terjadinya pergeseran nilai-nilai kegotongroyongan ke arah individualisme yang menyebabkan semakin berkurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Selain itu gerakan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan juga belum optimal pelaksanaannya.

- Tingkat Partisipasi Masyarakat yang Belum Merata
Tidak semua masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayahnya.
- Ketergantungan pada Bantuan Pemerintah
Banyak program pemberdayaan yang bergantung pada anggaran dari pemerintah daerah atau pusat, sehingga keberlanjutan program sering kali terganggu jika dukungan anggaran terbatas.

4. Permasalahan dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum.



Kondisi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kute Siantan secara umum dapat dikatakan cukup aman dan terkendali namun masih terjadi beberapa permasalahan dalam masyarakat khususnya konflik pertanahan. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang regulasi hukum yang menyangkut hak kepemilikan dan pengelolaan tanah pribadi maupun tanah warisan keluarga yang tentunya membutuhkan penanganan serius dari stakeholder terkait.

- Tantangan Penegakan Peraturan di Wilayah Terpencil
Jarak antar wilayah yang jauh menyulitkan pengawasan dan penegakan peraturan secara konsisten.
- Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat
Masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya menjaga ketertiban umum dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Pemetaan ini menjadi langkah awal dalam menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung stabilitas sosial-politik di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.8 Isu Strategis

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 138.2/5899/BAK pada tanggal 7 Oktober 2019 Perihal Pembentukan Kecamatan Kute Siantan sebagai Kecamatan Strategis Nasional. Pembentukan Kecamatan Kute Siantan merupakan Pembentukan Kecamatan yang bersifat Strategis Nasional karena terdapat pulau terluar yaitu Pulau Tokong Belayar sebagai pulau terluar dilawasan perbatasan yang menjadi



cakupan wilayah Kecamatan Kute Siantan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pulau-pulau Kecil Terluar yang sangat Strategis secara Nasional pada aspek Pertahanan dan Keamanan yang berbatasan dengan Negara Vietnam, aspek ekonomi dengan adanya Perusahaan Multinasional yang di dalamnya terdapat aset Vital Nasional serta aspek perikanan dan kelautan untuk menjaga tindakan ilegal dari Negara lain dibidang Eksplorasi hasil laut.

Kecamatan Kute Siantan dimaksudkan untuk menjaga integrasi Nasional dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kawasan Perbatasan Negara. Pembentukan Kecamatan bersifat Strategis Nasional telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa Pembentukan Kecamatan yang bersifat Strategis Nasional persyaratannya dapat dikecualikan dari Pembentukan Kecamatan pada umumnya.

Isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Kute Siantan tidak hanya mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, tetapi juga aspek eksternal seperti dampak perubahan iklim, tingkat partisipasi masyarakat, serta persaingan antar daerah dalam menarik perhatian pemerintah pusat dan daerah dan juga daerah atau kawasan Perbatasan. Dengan memahami permasalahan dan isu strategis ini, Kecamatan Kute Siantan dapat merumuskan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kendala sekaligus memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Isu Strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan Pelayanan adalah keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan dalam menyusun perencanaan yang efektif.



2.9 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas memainkan peran strategis dalam menentukan arah pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan potensi serta kebutuhan daerah. Sebagai daerah kepulauan dan Wilayah Perbatasan yang memiliki tantangan geografis, peran Kecamatan Kute Siantan menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa pembangunan dapat merata dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk pulau-pulau kecil yang terpencil. Namun, kompleksitas tugas tersebut sering kali terhambat oleh berbagai tantangan, mulai dari terbatasnya akses data yang akurat hingga lemahnya koordinasi antar perangkat daerah.

Permasalahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada efektivitas pelaksanaan program pembangunan, tetapi juga pada hasil pembangunan yang kurang optimal. Hambatan teknis, seperti minimnya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data, mengakibatkan perencanaan tidak berbasis bukti yang kuat. Hambatan infrastruktur dasar, seperti transportasi dan akses komunikasi yang belum memadai, turut memperlambat implementasi pembangunan, terutama di daerah terpencil. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas sangat penting untuk merumuskan strategi penyelesaian yang terukur, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan guna memastikan pembangunan yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan.

Berikut adalah tabel pemetaan Identifikasi permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:



Tabel. 2. 11

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah yang Dihadapi	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pelayanan Administrasi Publik	➤ Kurangnya aksesibilitas layanan di wilayah perbatasan.	❖ Kondisi geografis yang masih belum terjangkau secara merata.
		➤ Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan.	❖ Sistem pelayanan belum sepenuhnya berbasis digital.
		➤ Ketidacukupan fasilitas pendukung pelayanan.	❖ Keterbatasan anggaran untuk pengadaan fasilitas.
		➤ Standar Pelayanan Publik belum memenuhi standar pelayanan ➤ Praktek outsourcing ➤ Tidak ada keterbukaan informasi kontrak ➤ Ketenagakerjaan dari pihak perusahaan yang beroperasi di kecamatan kutesiantan	❖ Standar Sarpas Pelayanan Publik belum memenuhi ❖ Mengadakan Program pelatihan ❖ keterampilan dan penyertaan Modal usaha ❖ Pelatihan Bagi Pencari Kerja
		➤ Keterbatasan Ketersediaan Tenaga Medis ➤ Kurangnya Saprak Kesehatan	❖ Mendistribusikan Tenaga Medis sesuai kebutuhan ❖ Pengadaan Saprak Kesehatan
		➤ Keterbatasan Ruang Pelayanan Publik ➤ Minimnya Peratan dan Mesin Perkantoran ➤ dalam menunjang aktifitas Perkantoran	❖ Belum Memiliki Gedung Permanen ❖ Keterbatasan ketersediaan anggaran belanja ❖ modal aset peralatan dan mesin
2.	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	➤ Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan.	❖ Minimnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.
		➤ Koordinasi yang belum optimal antara kecamatan dan pemerintah desa.	❖ Kurangnya mekanisme komunikasi yang terstruktur dan efektif.
3.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	➤ Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang belum merata.	❖ Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran aktif dalam pembangunan.
		➤ Ketergantungan pada bantuan pemerintah dalam program pemberdayaan.	❖ Kurangnya diversifikasi sumber pendanaan atau kemandirian masyarakat dalam menjalankan program.



		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Minimnya pelaksanaan Pemeliharaan terhadap kondisi rusa jalan di pulau matak ➤ Ketersediaan Cadangan Air Minum pada saat kemarau 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perlu pemeliharaan ruas jalan secara rutin dan berkala dari perangkat daerah pelaksana teknis ❖ Peningkatan Pembangunan SPAM
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keterbatasann Kewenangan dan Kemampuan Kecamatan dalam Pembinaan ➤ Minimnya ketersedianya pasar tradisional di wilayah kecamatan kute siantan ➤ Kurang pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar ➤ Persentase Pelaksanaan Hasil Musrenbang Kecamatan masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Perlu dukungan Penganggaran untuk pelaksanaan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat ❖ Perlu pembangunan pasar rakyat secara merata di desa kecamatan kute siantan ❖ Perlunya peningkatan Pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan Pasar oleh Perangkat Daerah Pelaksana Teknis ❖ Perlu adanya Skala Prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan musrenbang
4.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tantangan penegakan peraturan di wilayah terpencil. ➤ Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. ➤ Adanya pelanggaran perda perijinan ➤ Meningkatnya Angka Kriminalitas / Penyakit ➤ Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Jarak antarwilayah yang jauh menyulitkan pengawasan rutin. ❖ Minimnya edukasi tentang hukum dan peraturan kepada masyarakat. ❖ Kurang sosialisasi Perda perijinan ❖ Kurang Tenaga pengamanan wilayah dan ❖ Keamanan Lingkungan dalam Penanganan ❖ Pekat



2.10 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode 5 (lima) tahun kedepan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu :

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”

“Energi Baru, Anambas Maju”

Terdapat 5 (lima) kata kunci/frasa yang terkandung pada rumusan visi tersebut dengan masing-masing dijabarkan sebagai berikut :

1. **Berdaya Saing**, adalah kondisi ketika sumber daya manusia (SDM) dan perekonomian Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki produktivitas yang tinggi dan mampu bersaing dengan daerah-daerah serupa lainnya. Kualitas SDM yang baik ini dibentuk dari layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai dan menjangkau seluruh warga. Melalui akses yang baik terhadap pendidikan, maka SDM daerah akan dapat bersaing dengan SDM dari daerah lain sehingga kebutuhan akan tenaga kerja terampil (high skilled workers) dapat dipenuhi oleh warga daerah sendiri. Pelaku-pelaku UMKM memiliki daya saing dan produktivitas berbekal kualitas input yang digunakan dan penggunaan teknologi. Daya saing yang meningkat tercermin dari Indeks Daya Saing Daerah
2. **Inovatif**, adalah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang adaptif dengan berbagai



pendekatan baru dalam pembangunan sehingga dapat senantiasa kreatif dalam mengembangkan solusi-solusi baru sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Berbagai perkembangan terkini yang menuntut adanya pendekatan yang inovatif adalah i) ketahanan pangan, energi, dan air (food, menaikkan, and water nexus), dan ii) serta perekonomian daerah yang dikembangkan dengan berbasis pada ekonomi biru.

3. **Agamis**, adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang memiliki keimanan, taat beribadah sesuai dengan keyakinannya, dan menjunjung nilai-nilai spritualitas dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat yang agamis menjadi pelengkap dari SDM yang berdaya saing, karena untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera, tidak cukup hanya berbekal daya saing (produktivitas dan keterampilan) saja, melainkan juga memerlukan moralitas yang tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Menaikkan yang Maha Esa.
4. **Unggul di Bidang Maritim**, adalah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengoptimalkan karunia yang dimilikinya berupa untaian gugusan pulau-pulau dan kekayaan potensi laut. Berbekal karunia tersebut, maka Kabupaten Kepulauan Anambas akan memajukan wisata bahari yang memanfaatkan lingkungan pantai dan laut sebagai daya tarik utama. Kekuatan dasar dari wisata bahari terletak pada pemandangan, keunikan alam, karakteristik ekosistem, kekhasan seni dan budaya serta karakteristik masyarakat. Untuk dapat memiliki keunggulan tersebut, maka infrastruktur pendukung usaha haruslah memadai dan prima, baik untuk perikanan (budidaya dan tangkap) maupun pariwisata. Diantara infrastruktur tersebut adalah ketersediaan energi, infrastruktur konektivitas dan logistik. Modernisasi dan digitalisasi harus dilakukan sehingga



untuk produk perikanan misalnya, produknya menjadi produk yang memiliki ketelusuran (traceability) sebagai permintaan dari pasar dunia. Sertifikasi untuk berbagai produk yang dihasilkan juga harus didapatkan sehingga produk-produk tersebut dapat dijamin kualitasnya bagi konsumen internasional. Pengembangan destinasi dan promosi wisata daerah menjadi hal yang dikedepankan. Tentunya perwujudan berbagai program tersebut memerlukan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit dan juga memerlukan sumber-sumber lain di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga peningkatan iklim investasi daerah harus dijadikan sebagai prioritas utama. Keunggulan di bidang maritim harus tercermin pada tingginya daya tarik investasi di Kabupaten Kepulauan Anambas.

- 5. Maju dan Sejahtera,** adalah ketika masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dapat mencapai taraf hidup yang makmur, sehat, dan damai. Kemakmuran menyangkut pada aspek ekonomi, sementara kesehatan menyangkut pada sisi fisik dan mental manusia. Adapun kedamaian terkait dengan aspek sosial, emosional, dan spiritual. Pengertian tersebut menandakan bahwa kesejahteraan bersifat multi-dimensi dan harus diupayakan pemenuhannya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas harus melakukan usaha-usaha yang cukup untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut melalui penyediaan dan perluasan jangkauan pelayanan-pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan yang tinggi tercermin dari rendahnya angka kemiskinan melalui sumber-sumber penghidupan warga yang berkelanjutan dan ditunjang oleh berbagai program kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi kelompok-kelompok yang membutuhkan.



Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam 5 (lima) misi dan juga 19 (sembilan belas) Program sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Agamis dan Berbudaya dengan Mengedepankan Nilai-nilai Luhur.

- 1) Program Zero Buta huruf usia 18 hingga 45 tahu (akan ada tim khusus melalui dinas terkait untuk dibuka kelas khusus baca tulis - Program rumah tahfidz);;
- 2) Program Bantuan Perlengkapan Sekolah SD-SMP;
- 3) Program Rumah Tahfidz;
- 4) Program Pemberian Insentif guru ngaji, imam dan marbot masjid;
- 5) Program Beasiswa Perguruan Tinggi;
- 6) Program Sertifikasi dan Optimalisasi Balai Latihan Kerja (BLK);
- 7) Program Pembangunan Anjungan Kebudayaan;
- 8) Program Event Kebudayaan;

2. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.

- 9) Program merangkai Pulau dan memangkas rentang kendali (Pesawat dan feri setiap hari rute Anambas - Batam dan Penambahan feri Rute Anambas - Malaysia);
- 10) Program Perbaikan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan;

3. Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif.



- 11) Program Menaikkan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi 12 Persen;
- 12) Pembentukan OPD (Organisasi Perangkat Daerah);
- 13) Program Optimalisasi Peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah);

4. Memperkuat Pengembangan Ekonomi Berbasis Maritim dan Pariwisata.

- 14) Program tangkap olah jual (TOJ) dan Optimalisasi tempat pelelangan ikan (TPI);
- 15) Program Hilirisasi Perikanan (Industrialisasi - terbukanya lapangan kerja);
- 16) Program Anambas Rest Area dan Ciptakan Destinasi Wisata Baru;

5. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan.

- 17) Program UMKM Naik Kelas;
- 18) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Lansia;
- 19) Program BPJS Tenaga Kerja Untuk Nelayan, Petani dan Buruh Lepas.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kute Siantan terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) dan Ke-5 (Kelima) yaitu “Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi” dan “Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan”.



Tabel. 2. 13

Persandingan Janji Politik dan Program Perangkat Daerah

Menaikkan.	Janji Politik		Program PD	Urusan
	Program	Kegiatan		
Misi 1 Meningkatkan sumber daya manusia yang inovatif dan berdaya saing menuju masyarakat yang agamis, berbudaya dan mengedepankan nilai-nilai luhur.				
1	Zero Buta Huruf	a. Mendata masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas yang berusia >18 tahun yang belum bisa baca-tulis, b. Bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai tenaga teknis mengajari mereka yang tidak bisa baca-tulis tersebut, c. Melakukan monitoring berkala untuk memastikan progress program Zero Buta Huruf.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
2	Bantuan Perlengkapan Sekolah Sd-Smp (Seragam, Tas, Sepatu, Kaos Kaki, Dan Buku	Adapun Perlengkapan Sekolah yang disediakan adalah: a. Seragam Merah-Putih / Biru - Putih b. Seragam Batik c. Seragam Olahraga d. Seragama Baju Kurung Melayu e. Seragam Pramuka f. Tas Sekolah g. Buku Tulis h. Sepatu i. Kaos Kaki		
3	Rumah Tahfidz	- Rumah Tahfidz akan dibangun di Ibu Kota Kabupaten, yakni Tarempa (Siantan), - Operasional Rumah Tahfidz akan bekerjasama dengan Pihak Ketiga - Santri Rumah Tahfidz adalah anak-anak Kepulauan Anambas dan tidak dipungut biaya / Gratis.	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Pendidikan
4	Insentif guru ngaji, imam mesjid dan marbot mesjid	- Akan di sesuaikan data dengan Lembaga Terkait jumlah Guru Ngaji, Imam Mesjid dan Marbot Mesjid yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, - Insentif yang diberikan setiap bulan berkisar Rp. 300.000 - Rp. 500.000.	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan
5	Beasiswa Perguruan Tinggi	- Beasiswa diberikan kepada anak Anambas yang ingin melanjutkan kuliah khususnya dibidang Kesehatan dan Pendidikan, - Anggaran Beasiswa sharing antara Pemerintah dan Swasta (CSR), - Kuota Beasiswa disesuaikan dengan Kondisi Keuangan Daerah dan CSR.		
6	Sertifikasi dan optimalisasi balai latihan kerja (blk)	Balai Latihan Kerja akan diaktifkan sebagai sarana Pelatihan dan Sertifikasi kepada masyarakat Kepulauan Anambas yang ingin meningkatkan keterampilan sekaligus mendapatkan sertifikat keterampilan tersebut, Anggaran Pelatihan dan Sertifikasi sharing dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN (Kementerian Terkait) dan CSR Swasta.	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
7	Pembangunan anjungan kebudayaan	Anjungan Kebudayaan dibangun sebagai sarana tempat beraktifitas Paguyuban Masyarakat yang ada di Kepulauan Anambas, Anjungan ini dibangun juga sebagai salah satu supporting Pariwisata, melalui event-event rutin baik lokal, maupun internasional yang dilaksanakan setiap tahun yang akan menjadi salah satu penarik wisatawan datang ke Kepulauan Anambas.	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
8	Program event kebudayaan	Event Kebudayaan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun dan menjadi Agenda Rutin yang bertujuan untuk meningkatkan toleransi antar budaya di Kepulauan Anambas dan juga untuk menarik minat kunjungan Wisatawan.	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Misi 2 Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.				



Menaikkan.	Janji Politik		Program PD	Urusan
	Program	Kegiatan		
1	Memangkas rentang kendali (akses transportasi)	Rute Pesawat Letung (Anambas) – Batam/ Batam – Anambas setiap hari,	2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
		Rute Kapal Letung – Tarempa setiap hari,	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
		Rute Kapal Anambas – Malaysia.		
2	Perbaiki Infrastruktur Jalan Dan Pelabuhan	Jalan dan Pelabuhan sebagai penunjang utama Akses Transportasi harus direvitalisasi dan diprioritaskan untuk di perbaiki atau dibangun,	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Anggaran pembangunan tersebut bisa sharing desa, kabupaten, provinsi dan pusat menyesuaikan dengan regulasi.		
3	Menaikkan alokasi dana desa (ADD)	Alokasi Dana Desa yang biasanya kurang dari 10%, akan dinaikan paling tinggi 12% untuk menopang Pembangunan di Desa dengan tujuan Pemerataan Pembangunan.	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Misi 3 Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif				
1	Pembentukan opd (organisasi perangkat daerah) disesuaikan dengan visi misi dan program kepala daerah terpilih	OPD akan di sesuaikan agar dapat optimal mengeksekusi program sesuai Visi Misi yang nanti akan tercantum pada RPJMD Tentunya penyesuaian tersebut harus sesuai Regulasi.	Program Penataan Organisasi	Unsur Sekretariat Daerah
2	Optimalisasi peran apip (aparatur pengawasan intern pemerintah)	Agar dapat meningkatkan kinerja Birokrasi Pemerintahan Daerah di Kepulauan Anambas, maka peran APIP akan dikedepankan dengan mensupport peran nya, khususnya dari segi Anggaran.	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah
		Tentunya akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.		
Misi 4 Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi				
1	Tangkap olah jual (toj) dan optimalisasi tempat pelelangan ikan (tpi)	TPI akan dibangun di 3 Pualau Besar (Jemaja, Siantan dan Palmatak)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Pembangunan tersebut dilakukan secara bertahap		
		Pengelolaan TPI diutamakan BUMD/Perseroda		



Menaikkan.	Janji Politik		Program PD	Urusan
	Program	Kegiatan		
2	Hilirisasi perikanan (industrialisasi)	Hilirisasi Perikanan sebagai bagian Supporting TPI Tentunya akan menyesuaikan dengan Investor yang tertarik untuk membangun industry disektor Perikanan.	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
3	Anambas rest area dan ciptakan destinasi wisata baru	Posisi Anambas cukup strategis karena berada di Laut Cina Selatan yang dilewati oleh Kapal Asing, Artinya Anambas bisa menjadi Check Point (Rest Area) bagi pelayaran internasional, tentu posisi ini harus dioptimalkan untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat, Harus dilakukan kajian untuk dapat merealisasikan Program ini.	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Misi 5 Meningkatkan kualitas kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan penanganan kemiskinan.				
1	UMKM Naik Kelas	Program UMKM Naik Kelas adalah untuk meningkatkan mutu UMKM baik dari Kualitas Produk, Pemasaran sampai kepada Peningkatan si Pelaku UMKM tersebut, OPD terkait harus melakukan pendataan Produk UMKM yang telah memiliki PIRT dan label Halal Pelatihan-Pelatihan yang berkelanjutan dan monitoring berkala untuk memastikan pelatihan tersebut benar-benar bermanfaat, Harus tersedia Pusat Oleh-Oleh yang isinya adalah Produk UMKM khususnya di Letung dan Tarempa sebagai salah satu media Pemasaran Hasil Produk UMKM	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
2	Bantuan langsung tunai (blt) lansia	Bantuan Langsung Tunai Lansia akan diberikan kepada mereka yang berumur minimal 60 tahun, Setiap bulan akan diberikan BLT sebesar Rp. 400.000, Mereka yang diberikan adalah diluar dari data DTKS yang juga dakan diberikan oleh Kementerian Sosial).	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
3	Bpjs tenaga kerja untuk nelayan, petani dan buruh lepas	Nelayan, Petani dan Buruh Lepas akan difasilitasi BPJS Tenaga Kerja secara bertahap menyesuaikan dengan data dari OPD Terkait, Iuran perbulan/perorang BPJS Tenaga Kerja adalah Rp. 16.800, Artinya jika Target kita per Tahun 3000 KK Nelayan, Petani dan Buruh Lepas, maka diperlukan anggaran Rp. 604.800.000 per Tahun Anggaran yang digunakan sharing dari anggaran Kabupaten dan Provinsi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Kesehatan



2.11 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Kementerian/lembaga pengampu urusan perencanaan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas dan juga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Kute Siantan perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, dengan indikator :
 - a. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan indikator:
 - a. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L,;
 - b. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L.
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan indikator:



- a. Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan K/L, dan
 - b. Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan K/L
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan indikator :
- a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
 - b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
 - c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional Selanjutnya, kementerian/ lembaga yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan daerah adalah Kementerian Dalam Negeri.

Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Kute Siantan perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian Dalam Negeri yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan indikator :



- a. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi;
- b. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan didaerah dengan kategori utama;

Berdasarkan sasaran strategis Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri diatas, maka faktor-faktor penghambat dan pendorong berdasarkan pelayanan Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah:

Faktor penghambat :

1. Rendahnya prosentase keselarasan rencana pembangunan pusat dan daerah;
2. Belum optimalnya rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti;
3. Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik;

Faktor pendorong :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia, yaitu merubah paradigma perencanaan “money follow function” menjadi “money follow program priority” dengan pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif dan spasial;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah menjadi alat ukur untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam berinovasi.

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi



pertimbangan bagi Kecamatan Kute Siantan dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Kute Siantan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor – faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Kute Siantan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Kute Siantan antara lain:

- 1) Adanya refocusing anggaran yang menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan tidak terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana di Kantor Kecamatan Kute Siantan, sehingga banyak tugas yang menjadi kendala, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan sarana dan prasarana.

Renstra Kecamatan Kute Siantan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas sedangkan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rancangan Akhir rencana strategis PD diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan Nasional.



2.12 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. Potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk



mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

a. Kawasan Strategis

Kecamatan Kute Siantan memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya Alam, maritim, pengembangan pariwisata, dan energi baru terbarukan. Untuk itu, kawasan strategis harus ditetapkan guna mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan, seperti pengelolaan hasil laut, pengembangan destinasi wisata berbasis ekowisata, dan eksplorasi energi surya serta angin. Sebagai wilayah kepulauan dan Perbatasan yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, tata kelola kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil perlu didasarkan pada pendekatan mitigasi bencana. Hal ini



mencakup perlindungan dari abrasi, penguatan infrastruktur pesisir, dan penataan ruang yang mendukung adaptasi terhadap kenaikan muka air laut serta gelombang pasang.

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kecamatan Kute Siantan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan publik yang berkualitas, pembinaan pemerintahan desa, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, terdapat berbagai tantangan yang memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat menjadi fokus perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan Kute Siantan.

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Isu-isu strategis ini diidentifikasi berdasarkan analisis terhadap kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta tantangan dan peluang yang ada. Berikut adalah isu-isu strategis Kecamatan Kute Siantan:

1. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik, melalui pengembangan infrastruktur pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi



Pemerintahan Desa

Meningkatkan kompetensi aparatur desa serta memperkuat sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di wilayah kecamatan.

4. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan

Pengarusutamaan gender menjadi bahan pertimbangan dan menjadi satu terintegrasi mewarnai dalam setiap langkah pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik yaitu sosial dan budaya. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah.

5. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Memperkuat penegakan hukum dan ketertiban umum melalui edukasi masyarakat serta pengawasan yang lebih efektif, khususnya di wilayah-wilayah terpencil.

6. Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

Mengantisipasi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi, dengan



menyusun kebijakan adaptasi dan mitigasi yang melibatkan masyarakat lokal.

Isu-isu strategis ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Kute Siantan. Dengan pendekatan yang terarah dan berbasis isu strategis, diharapkan program-program yang dirancang dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pengembangan Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur yang memadai merupakan kunci untuk meningkatkan konektivitas antar Desa di Kecamatan Kute Siantan. Optimalisasi jaringan transportasi, termasuk pelabuhan, bandara, dan transportasi laut, akan memperkuat arus logistik dan mobilitas penduduk. Selain itu, kebutuhan mendasar seperti air bersih harus menjadi prioritas, terutama karena keterbatasan *catchment area* di kawasan kepulauan. Pengembangan infrastruktur air baku, seperti waduk dan sistem distribusi air yang efisien, menjadi langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan domestik dan mendukung aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal. Selain itu, kawasan strategis, baik



dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

c. Fungsi Lindung dan Budidaya

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Penyelarasan fungsi lindung dan budidaya dalam tata ruang wilayah sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Kawasan hutan,



mangrove, dan lahan gambut yang berperan sebagai penyerap karbon dan pelindung alami dari bencana harus dilindungi dan dikelola dengan baik. Di sisi lain, pemanfaatan ruang untuk kegiatan produktif seperti perikanan, agrikultur, dan pariwisata harus dilakukan secara bijak dan berkelanjutan. Penataan ruang yang berbasis keberlanjutan akan memastikan kegiatan ekonomi tidak merusak ekosistem, melainkan saling mendukung dengan keberlangsungan lingkungan.

d. Sinergi dengan SDGs

RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas harus mencerminkan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Rencana tata ruang harus mendukung pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan harus menjadi prinsip utama. Dengan demikian, RTRW akan berperan sebagai panduan strategis untuk menciptakan wilayah yang lebih inklusif, tangguh terhadap perubahan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan.

2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen yang disusun ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis



(KLHS) merupakan “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.

Penyusunan KLHS memberi kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada keberlanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa aspek sebagai berikut:

- a. identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. mempertimbangkan alternatif-alternatif yang ada, termasuk opsi praktekpraktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul; dan
- e. aplikasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Kecamatan Kute Siantan sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi menyusun, mengoordinasikan, dan perencanaan dan perlu memperhatikan hasil kajian KLHS yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil penyusunan perencanaan berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan



berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Kepulauan Anambas antara lain :

a. Aspek Lingkungan Hidup

1) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi tantangan serius dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya untuk sektor pertanian dan penyediaan air bersih. Minimnya *catchment* area dan tekanan terhadap sumber daya alam membutuhkan strategi pemanfaatan yang efisien. Upaya konservasi lahan dan pengelolaan sumber daya berbasis teknologi harus diimplementasikan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kapasitas lingkungan.

2) Kerentanan terhadap Bencana

Sebagai daerah kepulauan, Anambas sangat rentan terhadap abrasi, banjir, dan gelombang pasang di wilayah pesisir, sementara kawasan lereng curam berisiko tinggi terhadap longsor. Pengelolaan tata ruang yang terintegrasi dengan mitigasi bencana diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Program seperti reboisasi, penguatan infrastruktur pesisir, dan penataan kawasan rawan bencana menjadi solusi penting untuk meningkatkan ketahanan wilayah.

3) Keanekaragaman Hayati

Hutan sekunder dan *mangrove* di Kabupaten Kepulauan Anambas berfungsi sebagai penyangga alami terhadap perubahan



iklim dan habitat penting bagi keanekaragaman hayati. Pelestarian kawasan ini harus menjadi prioritas utama melalui program rehabilitasi, konservasi ekosistem, dan pengendalian aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Hal ini tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis, tetapi juga mendukung sektor ekonomi seperti ekowisata.

b. Aspek Sosial dan Ekonomi:

1) Ketahanan Ekonomi

Promosi ekonomi biru menjadi dasar pembangunan ekonomi di Anambas, dengan fokus pada pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Inovasi dalam pengelolaan sektor perikanan, seperti digitalisasi proses perikanan dan penerapan teknologi akuakultur, serta modernisasi pertanian berbasis teknologi, akan mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing produk lokal.

2) Ketahanan Sosial

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih yang layak dan akses pendidikan berkualitas, merupakan langkah utama untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Program ini perlu diperluas untuk memastikan inklusi sosial dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

3) Riset dan Inovasi Daerah

Riset untuk pengembangan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya



sangat penting untuk mendukung diversifikasi energi di Anambas. Selain itu, pemanfaatan big data dalam pengelolaan kawasan dan layanan publik dapat memberikan informasi real-time yang mendukung pengambilan keputusan lebih efektif. Pendekatan ini memungkinkan perencanaan yang lebih responsif dan berbasis bukti, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam implementasi program pembangunan daerah.

2.13 Penentuan Isu-isu Strategis dan Potensi Daerah

Penentuan isu-isu strategis Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari :

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaahan Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan Potensi Sumber Daya Alam yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2023 Tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043. Adapun Sektor yang dapat dikembangkan Potensinya yaitu Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Industri dan Pertambangan, Masing-masing sektor diuraikan sebagai berikut :

A. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan

Sektor Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang ada di Kecamatan Kute Siantan mengingat sebagian besar wilayahnya berada di Kawasan Pesisir.



Pengembangan ini didukung oleh sarana penunjang penangkapan ikan diantaranya sebagai berikut :

1. Terdapatnya penampungan ikan di Desa Payalaman;
2. Terdapatnya Keramba Ikan yang tersebar di 5 (lima) Desa se Kute Siantan;
3. Terdapatnya Pengembangan perikanan budidaya air tawar di Desa Payalaman dan Desa Teluk Bayur.

B. Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian

Pengembangan Kawasan Pertanian di Kecamatan Kute Siantan ditujukan pada pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultur, perkebunan dan peternakan.

Tanaman perkebunan yang dikembangkan di Kecamatan Kute Siantan adalah perkebunan rakyat yang dikelola secara tradisional antara lain terdiri dari Komoditi Cengkeh, Kelapa dan Karet merupakan Komoditi perkebunan yang dominan ditanam di Kecamatan Kute Siantan disamping komoditi perkebunan lainnya seperti lada, pinang, sagu dan lain-lainnya yang diusahakan secara turun temurun.

Kawasan Budidaya Pertenakan berupa sapi potong, ternak unggas berupa ayam kampung yang tersebar di seluruh Desa di Kecamatan Kute Siantan.

C. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Rencana pengembangan Kawasan Pariwisata Budaya di Kecamatan Kute Siantan meliputi Keramat Gunung Kute yang berada di Desa Teluk Bayur dan juga Kawasan Pariwisata Minat Khusus meliputi Pulau Tokong Berlayar yang berada di Desa Batu Ampar serta Kawasan Pantai Biang yang berada di Desa Matak dan juga terdapat Kawasan Pariwisata Bakau yang berada di Desa Batu



Ampar dan Desa Teluk Bayur.

D. Potensi Pengembangan Kawasan Industri

Industri yang direncanakan untuk dapat dikembangkan di Kecamatan Kute Siantan antara lain Industri Kecil (khususnya Industri Makanan yang merupakan pengolahan dari hasil laut) dan Kawasan Peruntukan Industri Migas lepas pantai.

Pengembangan Industri Kecil dan Mikro meliputi :

1. Industri Rumah Tangga berupa Industri pengolahan hasil tangkapan laut;
2. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
3. Industri pembuatan Kapal Motor;
4. Industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan.

E. Potensi Pengembangan Kawasan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan di Kecamatan Kute Siantan meliputi Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan Mineral Non Logam dan Pertambangan Mineral Logam. Potensi Minyak dan Gas Bumi yang tersedia jumlahnya relatif besar, Minyak dan Gas Bumi merupakan wilayah kerja minyak dan gas bumi diperairan lepas pantai di Kecamatan Kute Siantan pada khususnya dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada umumnya dan Base Camp perusahaan yang menjadi pusat administrasi dari Perusahaan WNC yang berada di Kecamatan Kute Siantan.

Hasil analisis yang menjadi Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan dalam Sinergisitas antara Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 dan Rancangan Akhir



Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan 2025-2029, Sebagai berikut:

1. **Tantangan**

Berdasarkan isu-isu yang berkembang di masyarakat dan di identifikasikan tantangan-tantangan yang dihadapi berkaitan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kute Siantan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan yang meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal.

a. **Kondisi Internal**

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah :

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)
Pelayanan di Kecamatan Kute Siantan menghadapi tantangan dari sisi kualitas dan kuantitas SDM. Beberapa perangkat kecamatan belum memiliki kompetensi yang optimal sesuai dengan tuntutan tugas, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai di beberapa bidang menimbulkan beban kerja yang tinggi bagi staf yang ada.
- 2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana
Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan seperti kantor, perangkat IT, dan sarana komunikasi masih belum memadai. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil, belum dapat



dilakukan secara maksimal dan efisien.

3) Efisiensi Proses Kerja

Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan, seperti sistem administrasi terpadu, membuat proses pelayanan membutuhkan waktu lebih lama dan kurang efisien.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Kute Siantan juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu :

1) Perubahan Regulasi

Perubahan Regulasi dan Peraturan Perundang-undangan yang sulit didapatkan didalam pelaksanaan tugas dan fungsi dikecamatan.

2) Ekspektasi Publik yang Semakin Tinggi

Dinamika kebutuhan masyarakat yang meningkat menyebabkan permintaan pelayanan juga akan meningkat baik kualitatif maupun kuantitatif.

Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya peran aktif dalam pembangunan serta prosedur administratif, sehingga partisipasi



mereka dalam berbagai program kecamatan masih perlu ditingkatkan.

- 3) Keterbatasan Anggaran
Anggaran operasional kecamatan yang terbatas menjadi kendala dalam mendukung pelaksanaan program strategis, termasuk pengadaan sarana dan prasarana serta kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
- 4) Karakteristik Wilayah Kepulauan
Sebagai wilayah kepulauan, Kecamatan Kute Siantan menghadapi tantangan geografis yang cukup besar, termasuk aksesibilitas antar wilayah yang sulit dan ketergantungan pada moda transportasi laut. Hal ini memengaruhi distribusi pelayanan dan ketersediaan sumber daya di wilayah terpencil.
- 5) Dampak Perubahan Iklim
Kecamatan Kute Siantan yang memiliki karakteristik pesisir menghadapi risiko kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut dan abrasi. Hal ini dapat memengaruhi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
- 6) Akses Internet
Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat prosese pelayanan.
- 7) Persaingan dengan Wilayah Lain
Dalam konteks pengembangan



pelayanan dan pembangunan, Kecamatan Kute Siantan perlu bersaing dengan kecamatan lain di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mendapatkan alokasi sumber daya dan perhatian dari pemerintah daerah.

- 8) Kegiatan Masyarakat semakin beragam memerlukan fasilitas yang efektif dan ruang yang kreatif.
- 9) Semakin kritis dan terbukanya akses masyarakat dalam menuntut pelayanan Publik yang baik. Meningkatnya keterbukaan terhadap pelayan Publik, maka diperlukan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Jabatan struktural pada struktur organisasi kecamatan masih banyak yang kosong sehingga mempengaruhi kinerja Kecamatan Kute Siantan.
- 11) Letak Desa yang berjauhan dan sulitnya akses komunikasi.
- 12) Masih adanya kualitas Aparatur Pemerintah Desa yang rendah.



2. Peluang

Adapun peluang dan Potensi Strategis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan program dan kegiatan Kecamatan Kute Siantan dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

a. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Kecamatan Kute Siantan merupakan salah satu Kecamatan Perbatasan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau dan Kecamatan Kute Siantan perlu mendapatkan perhatian khusus selain menjadi Kawasan Strategis Nasional dengan mempertimbangkan Daerah Perbatasan, Pulau-pulau terluar dan terpencil, Kecamatan Kute Siantan merupakan Daerah Penghasil Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kabupaten Kepulauan Anambas dan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Perkembangan teknologi informasi menjadi peluang besar bagi Kecamatan Kute Siantan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Implementasi layanan berbasis digital, seperti e-government dan aplikasi pelayanan masyarakat, dapat mempercepat proses administrasi dan memperluas jangkauan pelayanan. Pengelolaan sampah yang sudah memadai dengan teknologi sudah bisa menghasilkan pupuk dan gas.

c. Kerjasama dan Sinergi serta Dukungan Partisipasi Masyarakat



Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya keterlibatan dalam pembangunan merupakan peluang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan masyarakat. Hal ini dapat mendukung keberhasilan program pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal.

d. **Komitmen Reformasi Birokrasi**

Mendukung Roadmap Reformasi Birokrasi 2025-2029. Roadmap Reformasi Birokrasi adalah peta jalan yang berisi program-program yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana aksi reformasi birokrasi. Dalam hal ini turut mendukung dan mewujudkan transformasi digital Competence (Pengembangan Kompetensi serta sistem pendidikan dan pelatihan untuk pemenuhan digital skill dan kepemimpinan digital) serta berkontribusi dalam menciptakan aparatur negara yang kompeten berdasarkan sistem merit.

e. **Potensi Pariwisata dan Sumber Daya Alam**

Kecamatan Kute Siantan memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata bahari, perikanan, dan sumber daya alam lainnya, seperti Migas dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Pengelolaan yang baik terhadap potensi ini dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah serta pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat perbatasan.



- f. Adanya Peran Swasta dalam Pembangunan Daerah di Wilayah Kecamatan Kute Siantan.

Dengan adanya Base Camp KKKS di Kecamatan Kute Siantan, seharusnya Kecamatan Kute Siantan mendapatkan peluang lebih besar dalam hal mendapatkan bantuan pembangunan dan dana CSR dari Perusahaan karena Kecamatan Kute Siantan merupakan Ring 1 (satu).

- g. Potensi Sumber Daya Alam yang sangat melimpah.

- h. Pusat Kawasan Strategis Nasional

Kecamatan perbatasan yang berbatasan langsung dengan Negara Tetangga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau dan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau serta Surat Surat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Nomor IKP.90.07/1496/IX/2024 pada tanggal 19 September 2024 Perihal Penyampaian Permintaan Dukungan Data Informasi Kelayakan Sarana dan Prasarana yang mendukung Konektivitas, Aksebilitas serta Energi di Kawasan Perbatasan.



Tabel. 2. 14

Perumusan Isu Strategis Daerah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	<p>Kurangnya Pemerataan Akses terhadap Layanan Pendidikan Berkualitas</p> <p>Kesadaran Masyarakat terhadap Urgensi Kesehatan, Pendidikan dan Lingkungan Masih Rendah</p> <p>SDM dan Tingkat Produktivitas Masyarakat masih Rendah</p> <p>Kurangnya Pemerataan Akses terhadap Layanan Kesehatan Berkualitas dan Terjangkau</p> <p>Nilai Karakter dan Budaya Masyarakat mulai Menurun</p>	Kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing	Perkembangan demografi global	<p>Akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.</p> <p>Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai</p> <p>Kualitas pendidikan yang masih rendah</p> <p>Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat</p> <p>Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN).</p> <p>Belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan</p> <p>Masih rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial</p> <p>Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan</p> <p>Karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global</p> <p>Kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat</p>	<p>Peningkatan Kualitas Pembangunan Manusia</p> <p>Peningkatan Kesejahteraan Sosial</p> <p>Penguatan Budaya Lokal</p>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Perlindungan Sosial dan Pemajuan Budaya
<p>Pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Kepulauan Anambas ditujukan pada pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.</p> <p>Potensi pengembangan kawasan pariwisata, dimana memiliki 1.460 ha lahan yang berpotensi untuk dijadikan kawasan pariwisata alam, Kawasan pariwisata budaya, Kawasan pariwisata minat</p>	<p>Produktivitas Masyarakat di Sektor Pertanian dan Harga Pangan yang Tidak Stabil</p> <p>Rendahnya Aktualisasi Gagasan Mengenai Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Unggulan Daerah</p>	<p>Ketahanan pangan dan energi</p> <p>Pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya maritim yang optimal</p>	<p>Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata</p>	<p>Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah</p> <p>Penguatan Perekonomian Daerah</p>	Pengembangan Ekonomi Biru dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat	



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
khusus, dan Kawasan pariwisata buatan						
Potensi pengembangan kawasan perikanan terpadu seluas 300 ha yang berada di Kecamatan Siantan Timur.	Tata Kelola dan Manajemen Sumber Daya Air yang Masih Belum Optimal	Pemenuhan kebutuhan dasar (air bersih dan sanitasi)		Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut		
Potensi pengembangan kawasan industri di lahan 520 ha yaitu industri kecil (khususnya industri makanan yang merupakan pengolahan dari hasil laut) dan alat angkut dimana lokasi dari rencana pengembangan kawasan industri	Masih Kurangnya Infrastruktur yang Memadai untuk Pengembangan Potensi Strategis Unggulan Daerah	Pengentasan kemiskinan daerah	Pertumbuhan kelas menengah (middle class)	Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi Produktivitas tenaga kerja Menaikkan selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal		
	Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang belum Optimal		Konstelasi perdagangan global	Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas. Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.		
	Keterhubungan antar Daerah dan Sistem Logistik yang Belum Optimal			Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur Permukiman dan Konektivitas Wilayah
	Penurunan Kualitas Lingkungan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan urbanisasi dunia	Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat di berbagai wilayah Menaikkan, tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya.		
	Upaya Penanggulangan Sampah dan Limbah yang Belum Optimal					
	Infrastruktur Pengelolaan Sampah dan Limbah yang Belum Memadai					
	Pengembangan Permukiman dan Ruang Terbuka Hijau yang Terbatas					
	Optimalisasi Sarana dan Prasarana TIK di Daerah		Perkembangan teknologi	Infrastruktur dan literasi digital masih terbatas		



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
	yang Masih Perlu Ditingkatkan Pengembangan Sektor Industri dan Teknologi Masih Terhambat dan Belum Menunjukkan Hasil yang Optimal					
Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Kepulauan Anambas meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan mineral non logam, dan pertambangan mineral logam.	Adanya Ancaman Daerah terhadap Bencana, Kebutuhan Pangan, dan Ketersediaan Energi	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Perubahan iklim	Peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.	Keberlanjutan Lingkungan	- Peningkatan Ketahanan Ekologi di Pulau-Pulau Kecil - Penguatan Ketahanan Pangan
	Perlindungan Sumberdaya dan Kelestarian Lingkungan yang Belum Memadai			Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau		
	Upaya Pelestarian DAS dan Daerah Resapan Air yang perlu Diperkuat			Tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan		
			Geopolitik dan geoekonomi	Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.		
Penerapan Kebijakan Daerah yang Belum Optimal Kerja Sama dan Inovasi Pembangunan Daerah yang Masih Belum Optimal Efisiensi dan Efektivitas Aparatur Negara dan Kualitas Pelayanan yang Masih Belum Optimal	Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Tata kelola keuangan global	Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah	Penguatan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Inovatif dan Responsif	
			Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif			
			Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.			
			Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.			
			ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik			
			Belum meratanya kualitas pelayanan publik.			
			Selain itu, kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.			



Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
			Global	Nasional	Regional	
				<p>Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar</p> <p>Beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik</p> <p>Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.</p> <p>Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.</p> <p>Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan</p> <p>Demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan.</p> <p>Stabilitas ekonomi makro Menaikkan saat ini cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun, tantangan ke depan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-pertumbuhan.</p> <p>Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.</p> <p>Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran</p>		
	Ketidakselarasan antara Sistem Perencanaan dan Penganggaran					
	Kurangnya Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Anggaran					
	-		Pemanfaatan luar angkasa (space economy)	-	-	



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Kute Siantan menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan yang ada. Tujuan-tujuan ini disusun berdasarkan analisis kondisi eksisting, potensi wilayah, dan visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas. Melalui pendekatan yang terukur dan strategis, tujuan dan sasaran ini menjadi panduan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja di tingkat kecamatan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan yang merupakan dokumen perencanaan Instansi Kecamatan Kute Siantan 5 (lima) tahun ke depan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini merupakan kerangka acuan serta gambaran situasi dan kondisi Instansi sebagai pola dasar perencanaan yang mampu mendorong berbagai komponen dan potensi yang ada guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Kute Siantan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran dirancang untuk mencapai hasil yang konkret dan terukur, sementara strategi dan kebijakan menjadi panduan dalam pelaksanaan program serta alokasi sumber daya. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan prioritas wilayah.



Dalam mencapai tujuan seperti yang tercantum dalam Visi dan Misi Kepala Daerah, maka perlu ada strategi dan kebijakan yang baik.

A. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi OPD. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kute Siantan adalah :

- a. Terwujudnya pelayanan yang prima
- b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik

B. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam pencapaian tujuan pembangunan sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka ditetapkan strategi pembangunan yaitu penguatan peran kelembagaan Kecamatan dan Desa terutama dalam meningkatkan kompetensi SDM, menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor dalam mendukung eksistensi organisasi pemberi layanan.

Sasaran yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kute Siantan adalah :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan
- b. Meningkatnya Kuantitas Capaian Kinerja Kecamatan Dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

C. Strategi Yang Dimaksud Adalah Sebagai Berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM PNS dan PPPK Kecamatan Kute Siantan dan Serta Aparatur Pemerintah Desa



2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung pelayanan yang prima
3. Melaksanakan Pembinaan dan Penataan Administrasi Desa secara berkala
4. Melaksanakan Urusan Pelimpahan Wewenang secara Optimal
5. Meningkatkan Kemajuan Teknologi
6. Meningkatkan Kualitas SDM Kelembagaan
7. Penguatan Birokrasi Reformasi

D. Arah Kebijakan Yang Dimaksud Adalah Sebagai Berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan SOP
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan sesuai Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
3. Peningkatan Aplikasi di Kecamatan
4. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa
5. Peningkatan Kualitas SDM Perangkat Desa Melalui Pendidikan dan Pelatihan
6. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Desa
7. Peningkatan peran serta Desa dalam kegiatan pembangunan dan Pemberdayaan
8. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan
9. Tata Kelola Pemerintahan berbasis e-government
10. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah



3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan atau memperhatikan sasaran RPJMD. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Kute Siantan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Adapun tujuannya yaitu: *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang Profesional, Responsif dan Inovatif Menuju Pelayanan Prima Bagi Masyarakat”*.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Pembangunan;
2. Meningkatkan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja Kecamatan Kute Siantan yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun



2020-2024, dengan dipandu Visi : *Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.* Dengan uraian misi sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Kecamatan Kute Siantan melalui Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan umum, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi;
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.



Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - a) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - b) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu
 - c) Indeks Kinerja Ormas.
2. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
3. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - a) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - b) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - c) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - d) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi :
 - a) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.



b) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kute Siantan untuk jangka waktu 5 tahun kedepan, Kecamatan Kute Siantan menetapkan Sasaran sebagai berikut:

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu:

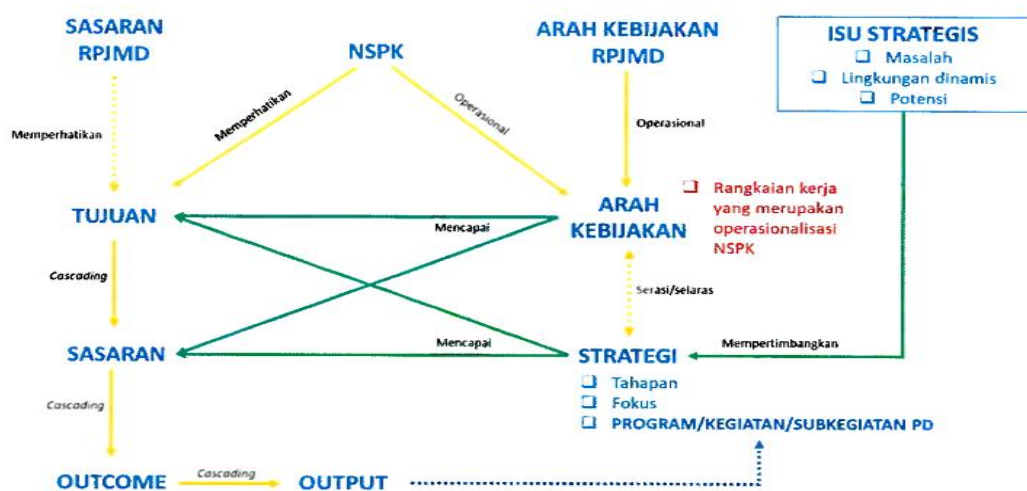
1. Meningkatnya Partisipasi pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong.
2. Meningkatnya Tata Kelola Kecamatan Kute Siantan yang baik, bersih dan akuntabel.
3. Meningkatnya pelayanan Publik di Kecamatan Kute Siantan.
4. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Kute Siantan

Penetapan sasaran yang terukur dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dilaksanakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Sasaran ini diukur dengan indikator kinerja yang relevan, mencakup berbagai aspek seperti kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, hingga pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran dapat dipantau secara sistematis, sekaligus menjadi dasar untuk mengevaluasi pencapaian yang telah diraih.

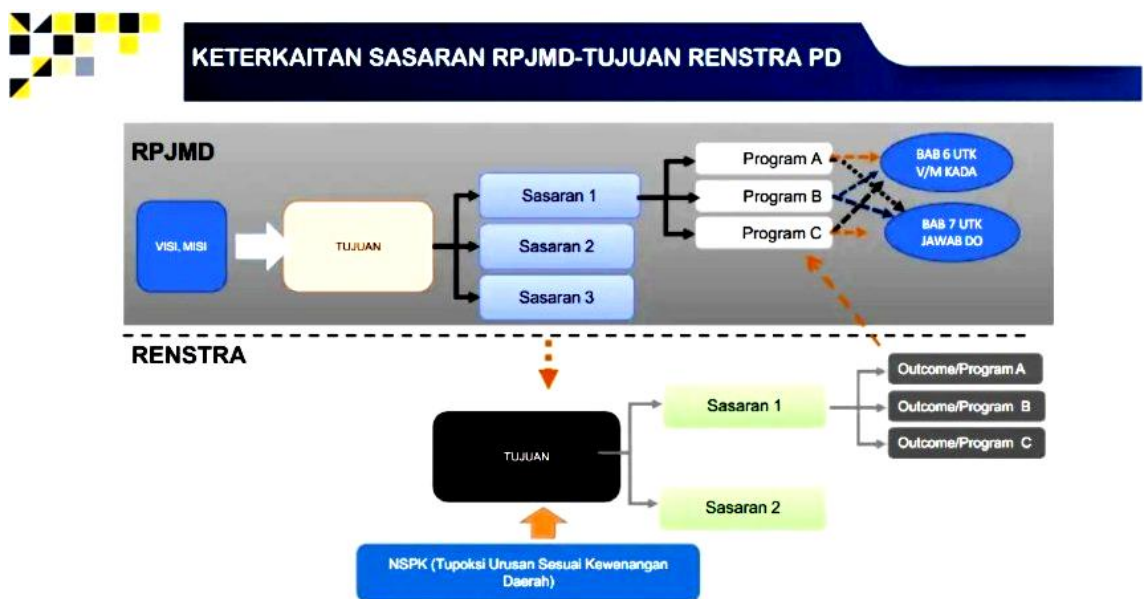
Melalui tabel berikut, disajikan rincian tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai setiap tahun selama periode 2025-2029. Rincian ini menjadi komitmen

Kecamatan Kute Siantan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang efektif, dan pembangunan yang inklusif. Implementasi tujuan dan sasaran ini diharapkan dapat mendorong keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan di wilayah Kecamatan Kute Siantan.

Gambar 3. 1
Konsep Kinerja Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3. 2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD





3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan sasaran Renstra PD.

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Kebijakan Perangkat Daerah merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Kute Siantan.

Strategi difokuskan pada upaya menyelesaikan permasalahan mendasar, memanfaatkan potensi, dan menangkap peluang pembangunan. Sementara itu, arah kebijakan ditetapkan untuk memberikan panduan teknis yang lebih spesifik dalam pelaksanaan strategi. Dengan sinergi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, Kecamatan Kute Siantan berkomitmen untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya secara optimal. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasional Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta



selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Dalam rangka mendukung pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Kecamatan Kute Siantan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang menjadi landasan pelaksanaan program kerja selama periode 2025-2029. Tujuan dan sasaran dirancang untuk mencapai hasil yang konkret dan terukur, sementara strategi dan kebijakan menjadi panduan dalam pelaksanaan program serta alokasi sumber daya. Pendekatan ini bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan prioritas wilayah.

Arah kebijakan Prioritas RPJMD Tahun 2025-2029 memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas Nasional dalam Rancangan Akhir Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, kesesuaian Visi, Misi dan Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2025-2045, isu-isu strategis yang berkembang kebijakan Nasional dan Regulasi yang berlaku.



Tabel 3. 3
Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Kependagri No. 900.1.12.5-3406	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Predikat SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	Nilai SAKIP	60,10	65.34	68.45	70.85	75.25	80.25	
		Meningkatnya Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	70.45	75.25	76.45	78.36	79.20	80.25	



Tabel 3. 4
Penahapan Renstra PD

Strategi dan Arah Kebijakan (Misi 3)

MISI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN 1 (2026)	TAHAPAN 2 (2027)	TAHAPAN 3 (2028)	TAHAPAN 4 (2029)	TAHAPAN 5 (2030)	
Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah dan cepat	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah	Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui peningkatan literasi kebijakan publik, keterlibatan dalam perencanaan dan penganggaran partisipatif, serta penguatan mekanisme kontrol sosial terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah.	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan prestasi kerja pemerintah melalui penerapan transparansi, penguatan sistem akuntabilitas keuangan daerah, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.	Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan pemerintah daerah	Pemantapan Sistem Tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah, dan cepat	
	Peningkatan kapasitas dan iklim inovasi daerah dalam mendukung reformasi birokrasi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan kerjasama daerah	Membuat peta jalan (roadmap) peningkatan kapasitas dan pengembangan inovasi yang terintegrasi dengan reformasi birokrasi	Peningkatan pemanfaatan hasil litbang jirap,serta invensi dan inovasi sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan daerah	Meningkatkan kerjasama multihelix dalam mendukung pembangunan wilayah	Pemantapan Sistem birokrasi daerah berbasis inovasi	
	Meningkatkan manajemen aparatu yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi	Peningkatan kualitas pengelolaan SDM Aparatur	Peningkatan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	Peningkatan Kinerja melalui Sistem Manajemen yang Efektif		
	Meningkatnya kinerja pemerintahan yang profesional, akuntabel, amanah dan berintegritas	Peningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas layanan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas hingga kecamatan dan desa		Peningkatan sistem dan mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai unsur		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	Peningkatan infrastruktur pendukung pelayanan publik yang prima	Peningkatkan pemanfaatan teknologi secara optimal untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang handal	Peningkatan digitalisasi pelayanan publik	Peningkatan kualitas pelayanan melalui penggunaan teknologi		



Strategi dan Arah Kebijakan (Misi 5)

MISI	ARAH KEBIJAKAN	TAHAPAN 1 (2026)	TAHAPAN 2 (2027)	TAHAPAN 3 (2028)	TAHAPAN 4 (2029)	TAHAPAN 5 (2030)
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan	Mengembangkan UMKM yang profesional, produktif, dan berdaya saing	Pembangunan Basis Data Tunggal (BDT) UMKM	Peningkatan kapasitas UMKM (pembiayaan, kemampuan manajemen, pengolahan logistik bahan pangan)	Penyediaan skema pembiayaan	Peningkatan akses pasar produk-produk UMKM Sertifikasi produk-produk UMKM	Peningkatan produktivitas UMKM
	Memberikan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi kelompok marjinal, dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien			Pemberian BLT bagi Lansia	Pembangunan Rumah Layak Huni melalui pembiayaan pemerintah pusat	
	Mempercepat pembangunan dan penuntasan kemiskinan	Pendataan dan pemutakhiran jumlah penduduk miskin dan penerima perlindungan sosial lainnya	Peningkatan kepemilikan data dan akses dokumen kependudukan masyarakat miskin/rentan miskin	Pelaksanaan Bantuan Sosial Adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasan kemiskinan melalui pembiayaan pusat dan daerah		
Memberikan perlindungan sosial kepada nelayan, petani, dan buruh lepas	Penyusunan SOP mengenai penyaluran bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada nelayan, petani, dan buruh lepas	Pendataan dan pemutakhiran jumlah nelayan, petani, dan buruh lepas calon penerima bantuan	Kerja sama antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan	Sosialisasi dan edukasi kepada calon penerima bantuan	Penyaluran bantuan iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Nelayan, Petani, dan Buruh Lepas	



Tabel 3. 5
Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, Kepmendagri No. 900.1.12.5-3406	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, ramah dan cepat	1. Tata Kelola Pemerintahan berbasis e-government 2. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan di wilayah perbatasan 3. Peningkatan Pelayanan Publik sesuai dengan SOP	-
2.		Peningkatan kapasitas dan iklim inovasi daerah dalam mendukung reformasi birokrasi	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kecamatan sesuai Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-
3.		Meningkatkan manajemen aparatur yang memiliki Kualifikasi, Kompetensi dan Kinerja	1. Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur desa 2. Peningkatan Kualitas SDM Perangkat Desa Melalui Pendidikan dan Pelatihan 3. Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa	-
4.		Meningkatnya kinerja pemerintahan yang profesional, akuntabel, amanah dan berintegritas	1. Penyusunan jadwal rutin dan pedoman pelaksanaan koordinasi	-
5.		Terwujudnya tata kelola pemerintahan berbasis digital	1. Digitalisasi sistem pelayanan administrasi 2. Peningkatan Aplikasi di Kecamatan	-
6.		Mengembangkan UMKM yang profesional, produktif, dan berdaya saing	1. Fasilitasi UMKM terkait Pembinaan	-
7.		Memberikan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi kelompok marjinal, dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	1. Penambahan dukungan teknis dan finansial untuk program pemberdayaan	-
8.		Mempercepat pembangunan dan penuntasan kemiskinan	1. Peningkatan Fasilitas sarana dan Prasarana di Desa 2. Peningkatan Peran serta Desa dalam kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan 3. Penyusunan program edukasi pembangunan berbasis masyarakat	-
9.		Memberikan perlindungan sosial kepada nelayan, petani, dan buruh lepas	1. Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam rangka Persoalan Hukum	-



Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu tahun 2025 hingga 2029:

Tabel ini menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan diambil oleh Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam upaya mencapai tujuan jangka menengah. Dengan arahan kebijakan yang jelas, diharapkan seluruh program yang dijalankan akan menghasilkan dampak positif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tabel. 3. 6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Isu Strategis				
1. Kecamatan Kute Siantan Sebagai Kecamatan Kawasan Strategis Nasional dengan Pertimbangan Daerah Perbatasan				
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Perbatasan diusulkan kepada Pemerintah Pusat (BNPP)				
3. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)				
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik				
5. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa				
6. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan				
7. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat				
Visi	: Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
Misi	: 3. Mewujudkan Menciptakan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi			
	: 5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan dengan Tersedianya layanan yang cepat, efisien, dan terjangkau	- Mengembangkan infrastruktur pelayanan publik.	- Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan di wilayah perbatasan.
			- Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelayanan.	- Digitalisasi sistem pelayanan administrasi.
2	Memperkuat tata kelola pemerintahan	Peningkatan kapasitas aparatur desa	- Mengadakan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur desa.	- Peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan SDM aparatur desa.
		Optimalisasi koordinasi kecamatan dan desa	- Membentuk mekanisme komunikasi dan rapat koordinasi berkala.	- Penyusunan jadwal rutin dan pedoman pelaksanaan koordinasi.



Isu Strategis

1. Kecamatan Kute Siantan Sebagai Kecamatan Kawasan Strategis Nasional dengan Pertimbangan Daerah Perbatasan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Perbatasan diusulkan kepada Pemerintah Pusat (BNPP)
3. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP)
4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik
5. Penguatan Kapasitas dan Koordinasi Pemerintahan Desa
6. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
7. Peningkatan Ketertiban dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Visi : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera

Misi : 3. Mewujudkan Menciptakan Pelayanan Prima Melalui Reformasi Birokrasi

: 5. Meningkatkan Kualitas Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanganan Kemiskinan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Kecamatan dalam Hal Urusan Pelimpahan Kewenangan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pembinaan dan Penataan Administrasi Desa secara Berkala - Melaksanakan Urusan Pelimpahan Wewenang secara Optimal - Meningkatkan Kemajuan Teknologi - Meningkatkan Kualitas SDM Kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Desa - Peningkatan Kualitas SDM Perangkat Desa melalui Pendidikan dan Pelatihan - Peningkatan Fasilitas sarana dan Prasarana di Desa - Peningkatan Peran serta Desa dalam kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan - Peningkatan kesadaran Masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan
3	Mendorong partisipasi masyarakat	<p>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan</p> <p>Penguatan program pemberdayaan masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi. - Memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat berbasis ekonomi lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan program edukasi pembangunan berbasis masyarakat. - Penambahan dukungan teknis dan finansial untuk program pemberdayaan.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai tujuan strategis dan sasaran pembangunan Kecamatan Kute Siantan periode 2025-2029, telah disusun rencana program dan kegiatan yang mendukung optimalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola pemerintahan. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada, dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Selain itu, setiap program didukung oleh alokasi pendanaan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan optimal selaras dengan Visi dan Misi Bupati Terpilih Periode 2025-2029.

4.1 Uraian Program dan Kegiatan

Pendanaan untuk pelaksanaan program-program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan dukungan tambahan dari potensi sumber pendanaan lainnya. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan juga akan menjadi salah satu strategi dalam mengimplementasikan program.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Mendukung administrasi umum pemerintahan, seperti pengelolaan aset dan keuangan kecamatan.

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Barang Milik Daerah
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

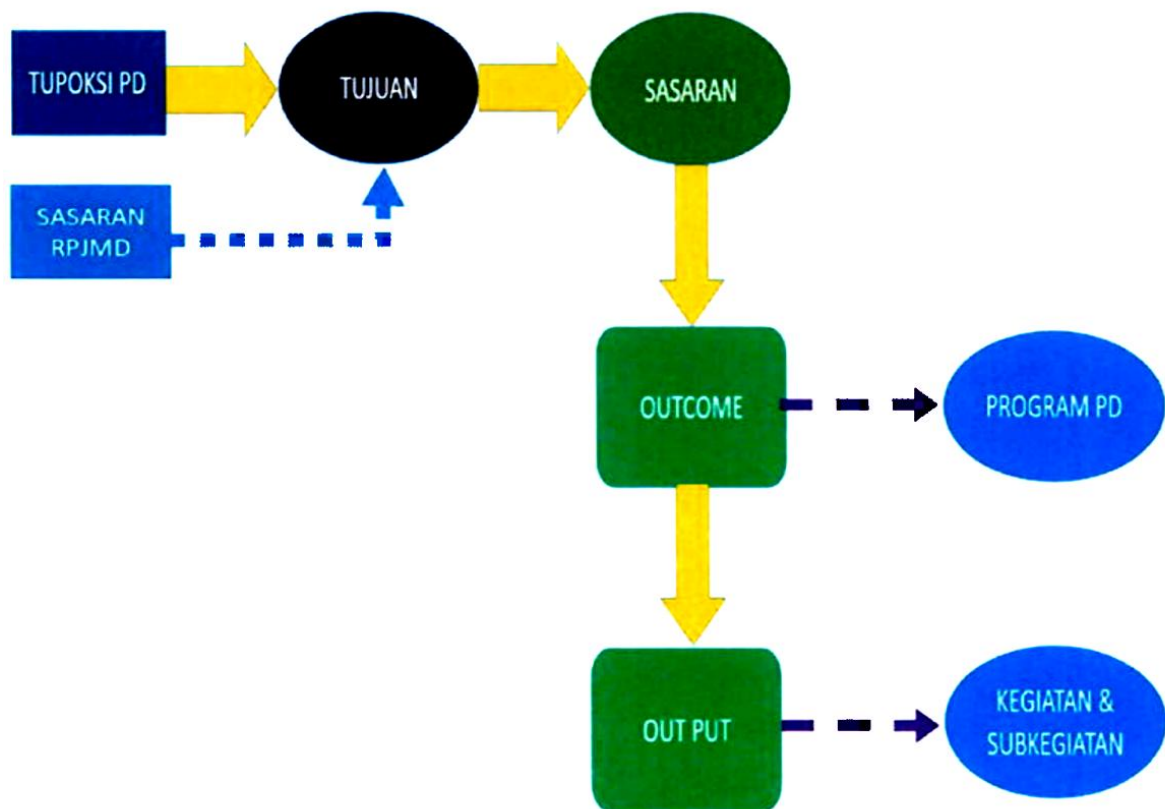
Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan dan peningkatan kapasitas aparatur.

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat



3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pelatihan dan pendampingan.
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
 - c. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Menguatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga ketentraman wilayah.
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan melalui pembenahan tata kelola administrasi.
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Menguatkan tata kelola desa melalui pelatihan aparatur dan supervisi rutin.
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Gambar 4. 1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Adapun penyajiannya sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel. 4. 2
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
Imendagri Nomor 2 Tahun 2025, Kepmendagri No. 900.1.12.5-3406	T1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas	S1.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	OC1.1.1	Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	OT1.1.1.1 Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah OT1.1.1.2 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah OT1.1.1.3 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD OT1.1.1.4 Terlaksananya Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	T1	Predikat AKIP		
						S1.1	Nilai AKIP	PROG.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
						OC1.1.1	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	KEG.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						OT1.1.1.1	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	SUB KEG. 1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUB KEG. 1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	SUB KEG. 1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD	SUB KEG. 1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	SUB KEG. 1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SUB KEG. 1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUB KEG. 1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						OT1.1.1.2	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEG.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	SUB KEG. 1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUB KEG. 1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUB KEG. 1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester/Akhir Tahun SKPD	SUB KEG. 1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
OT1.1.1.3	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KEG.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUB KEG. 1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	SUB KEG. 1.3.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						
OT1.1.1.4	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	KEG.1.4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						
	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah	SUB KEG. 1.4.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						
	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	SUB KEG. 1.4.2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (7)	KETERANGAN (8)
				OT1.1.1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	OT1.1.1.5 Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	KEG.1.5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SUB KEG. 1.5.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya SUB KEG. 1.5.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi SUB KEG. 1.5.3 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				OT1.1.1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah	OT1.1.1.6 Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KEG.1.6 Administrasi Umum Perangkat Daerah SUB KEG. 1.6.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor SUB KEG. 1.6.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor SUB KEG. 1.6.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SUB KEG. 1.6.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor SUB KEG. 1.6.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan SUB KEG. 1.6.6 Penyediaan Bahan/Material SUB KEG. 1.6.7 Fasilitas Kunjungan Tamu SUB KEG. 1.6.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				OT1.1.1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.7 Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disewa	KEG.1.7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SUB KEG. 1.7.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SUB KEG. 1.7.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan SUB KEG. 1.7.3 Pengadaan Mebel SUB KEG. 1.7.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SUB KEG. 1.7.5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya SUB KEG. 1.7.6 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				OT1.1.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	OT1.1.1.8 Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KEG.1.8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah SUB KEG. 1.8.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SUB KEG. 1.8.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik SUB KEG. 1.8.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (7)	KETERANGAN (8)
				OT1.1.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	SUB KEG. 1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Mebel yang di Pelihara	SUB KEG. 1.9.2	Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	SUB KEG. 1.9.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	SUB KEG. 1.9.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		S1.2 Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan					
			OC1.1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Publik		PROG.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				OT1.1.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KEG.2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SUB KEG. 2.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
				OT1.1.2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Kecamatan	KEG.2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	SUB KEG. 2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan
				OT1.1.2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	KEG.2.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	SUB KEG. 2.3.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
					Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan		
			OC1.1.3	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan		PROG.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				OT1.1.3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	KEG.3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	SUB KEG. 3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SUB KEG. 3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				OT1.1.3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	KEG.3.2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	SUB KEG. 3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	SUB KEG. 3.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	SUB KEG. 3.2.3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan



Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	OUTPUT (5)	INDIKATOR (6)	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN (7)	KETERANGAN (8)
				OT1.1.3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	KEG.3.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	SUB KEG. 3.3.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SUB KEG. 3.3.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
			OC1.1.4	Meningkatnya Pengendalian Keamanan, Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan		PROG.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				OT1.1.4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	KEG.4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SUB KEG. 4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SUB KEG. 4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
			OC1.1.5	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		PROG.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				OT1.1.5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	KEG.5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	SUB KEG. 5.1.1	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SUB KEG. 5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
			OC1.1.6	Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PROG.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				OT1.1.6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	KEG.6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	SUB KEG. 6.1.1	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	SUB KEG. 6.1.2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	SUB KEG. 6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	SUB KEG. 6.1.4	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	SUB KEG. 6.1.5	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	SUB KEG. 6.1.6	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga
					Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	SUB KEG. 6.1.7	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	SUB KEG. 6.1.8	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya



4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kute Siantan adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Kute Siantan tahun 2025- 2029. Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kute Siantan bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun penyajiannya sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel. 4. 3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET (4)	PAGU (5)	TARGET (6)	PAGU (7)	TARGET (8)	PAGU (9)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Indeks Kepuasan Masyarakat	100%	100%	4.091.031.746,00	100%	4.131.942.063,00	100%	4.173.261.484,00	100%	4.214.994.099,00	100%	4.257.144.040,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tahunan Perangkat Daerah	100%	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	6.000.000,00	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	900.000,00	2 Dokumen	900.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	1 Dokumen	1.100.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	1 Dokumen	1.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	1 Dokumen	0,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	900.000,00	1 Laporan	900.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	1 Laporan	1.100.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Laporan	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	1 Laporan	500.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	3.790.085.305,00	100%	3.827.051.722,00	100%	3.864.387.803,00	100%	3.902.097.245,00	100%	3.940.183.782,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	46 Orang/Bulan	3.696.641.705,00	40 Orang/Bulan	3.733.608.122,00	40 Orang/Bulan	3.770.944.203,00	40 Orang/Bulan	3.808.653.645,00	40 Orang/Bulan	3.846.740.182,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	7 Dokumen	86.169.600,00	7 Dokumen	86.169.600,00	7 Dokumen	86.169.600,00	7 Dokumen	86.169.600,00	7 Dokumen	86.169.600,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.637.000,00	1 Laporan	4.637.000,00	1 Laporan	4.637.000,00	1 Laporan	4.637.000,00	1 Laporan	4.637.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	16 Laporan	16 Laporan	2.637.000,00	16 Laporan	2.637.000,00	16 Laporan	2.637.000,00	16 Laporan	2.637.000,00	16 Laporan	2.637.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	100%	0,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	1 Paket	0,00	0,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00	1 Orang	0,00	0,00
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	40 Orang	40 Orang	0,00	40 Orang	0,00	40 Orang	0,00	40 Orang	0,00	40 Orang	0,00	0,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	94.733.938,09	100%	98.677.838,09	100%	102.661.178,09	100%	106.684.351,09	100%	110.747.755,09	0,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	1 Paket	21.993.878,00	1 Paket	21.993.878,00	1 Paket	21.993.878,00	1 Paket	21.993.878,00	1 Paket	21.993.878,00	0,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	6.600.875,00	10 Paket	6.600.875,00	10 Paket	6.600.875,00	10 Paket	6.600.875,00	10 Paket	6.600.875,00	0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	13.934.800,00	8 Paket	13.934.800,00	8 Paket	13.934.800,00	8 Paket	13.934.800,00	8 Paket	13.934.800,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00	2 Paket	5.000.000,00	0,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket	2 Paket	0,00	2 Paket	0,00	2 Paket	0,00	2 Paket	0,00	2 Paket	0,00	0,00
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	4 Laporan	3.567.440,00	4 Laporan	3.567.440,00	4 Laporan	3.567.440,00	4 Laporan	3.567.440,00	4 Laporan	3.567.440,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	4 Laporan	43.636.945,09	4 Laporan	47.580.845,09	4 Laporan	51.564.185,09	4 Laporan	55.587.358,09	4 Laporan	59.650.762,09	0,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	169.432.487,91	100%	169.432.487,91	100%	169.432.487,91	100%	169.432.487,91	100%	169.432.487,91	0,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	0,00
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	0,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	1 Unit	0,00	0,00
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	169.432.487,91	2 Unit	169.432.487,91	2 Unit	169.432.487,91	2 Unit	169.432.487,91	2 Unit	169.432.487,91	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	20.210.000,00	100%	20.210.000,00	100%	20.210.000,00	100%	20.210.000,00	100%	20.210.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	1 Laporan	0,00	0,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.210.000,00	12 Laporan	20.210.000,00	12 Laporan	20.210.000,00	12 Laporan	20.210.000,00	12 Laporan	20.210.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00	12 Laporan	0,00	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	10.570.015,00	100%	10.570.015,00	100%	10.570.015,00	100%	10.570.015,00	100%	10.570.015,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	5.400.015,00	2 Unit	5.400.015,00	2 Unit	5.400.015,00	2 Unit	5.400.015,00	2 Unit	5.400.015,00	0,00
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang di Pelihara	0 Unit	12 Unit	0,00	12 Unit	0,00	12 Unit	0,00	12 Unit	0,00	12 Unit	0,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	5.170.000,00	2 Unit	5.170.000,00	2 Unit	5.170.000,00	2 Unit	5.170.000,00	2 Unit	5.170.000,00	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	2 Unit	0,00	0,00

Kecamatan Kute Siantan



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100%	100%	34.112.700,00	100%	37.612.700,00	100%	39.112.700,00	100%	41.612.700,00	100%	43.112.700,00	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	25.112.700,00	100%	27.112.700,00	100%	27.112.700,00	100%	28.112.700,00	100%	28.112.700,00	
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0 Laporan	2 Laporan	25.112.700,00	2 Laporan	27.112.700,00	2 Laporan	27.112.700,00	2 Laporan	28.112.700,00	2 Laporan	28.112.700,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	100%	3.000.000,00	100%	4.000.000,00	100%	5.000.000,00	100%	6.000.000,00	100%	7.000.000,00	
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0 Dokumen	2 Laporan	3.000.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	7.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	100%	6.000.000,00	100%	6.500.000,00	100%	7.000.000,00	100%	7.500.000,00	100%	8.000.000,00	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.500.000,00	2 Laporan	7.000.000,00	2 Laporan	7.500.000,00	2 Laporan	8.000.000,00	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100%	100%	249.403.096,00	100%	284.903.096,00	100%	314.403.096,00	100%	347.903.096,00	100%	378.403.096,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	100%	6.000.000,00	100%	7.500.000,00	100%	9.000.000,00	100%	10.500.000,00	100%	12.000.000,00	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0 Lembaga	2 Laporan	3.500.000,00	2 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	4.500.000,00	2 Laporan	5.000.000,00	2 Laporan	5.500.000,00	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	2 Laporan	3.500.000,00	2 Laporan	4.500.000,00	2 Laporan	5.500.000,00	2 Laporan	6.500.000,00	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100%	100%	143.403.096,00	100%	168.403.096,00	100%	182.403.096,00	100%	197.403.096,00	100%	213.403.096,00	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang di selenggarakan	2 Lembaga	2 Lembaga	17.090.000,00	2 Lembaga	19.090.000,00	2 Lembaga	21.090.000,00	2 Lembaga	22.090.000,00	2 Lembaga	23.090.000,00	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang ditingkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	2 Lembaga	125.313.096,00	2 Lembaga	145.313.096,00	2 Lembaga	155.313.096,00	2 Lembaga	165.313.096,00	2 Lembaga	175.313.096,00	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0 Unit	10 Unit	1.000.000,00	10 Unit	4.000.000,00	10 Unit	6.000.000,00	10 Unit	10.000.000,00	10 Unit	15.000.000,00	
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	100%	100.000.000,00	100%	109.000.000,00	100%	123.000.000,00	100%	140.000.000,00	100%	153.000.000,00	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	180 Keluarga	85.000.000,00	180 Keluarga	95.000.000,00	180 Keluarga	105.000.000,00	180 Keluarga	115.000.000,00	180 Keluarga	125.000.000,00	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0 Keluarga	80 Keluarga	15.000.000,00	80 Keluarga	14.000.000,00	80 Keluarga	18.000.000,00	80 Keluarga	25.000.000,00	80 Keluarga	28.000.000,00	
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100%	100%	36.018.100,00	100%	41.018.100,00	100%	46.018.100,00	100%	51.018.100,00	100%	56.018.100,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	36.018.100,00	100%	41.018.100,00	100%	46.018.100,00	100%	51.018.100,00	100%	56.018.100,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	2 Laporan	6.000.000,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	2 Laporan	30.018.100,00	2 Laporan	35.018.100,00	2 Laporan	40.018.100,00	2 Laporan	45.018.100,00	2 Laporan	50.018.100,00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	105.000.000,00	100%	107.000.000,00	100%	108.411.532,00	100%	125.000.000,00	100%	129.170.246,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	100%	105.000.000,00	100%	107.000.000,00	100%	108.411.532,00	100%	125.000.000,00	100%	129.170.246,00	
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	150 Orang	250 Orang	95.000.000,00	250 Orang	97.000.000,00	250 Orang	98.411.532,00	250 Orang	115.000.000,00	250 Orang	119.170.246,00	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	12 Dokumen	10.000.000,00	
	Persentase partisipasi masyarakat dalam												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	75.466.104,00	100%	80.376.422,00	100%	93.466.104,00	100%	85.965.656,00	100%	94.466.104,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	100%	75.466.104,00	100%	80.376.422,00	100%	93.466.104,00	100%	85.965.656,00	100%	94.466.104,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00	2 Dokumen	4.000.000,00	2 Dokumen	12.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	15.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	16.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	2 Dokumen	5.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	1 Dokumen	6.000.000,00	
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	0 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00	
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Dalam Rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	0 Dokumen	2 Dokumen	5.240.800,00	2 Dokumen	6.240.800,00	2 Dokumen	5.240.800,00	2 Dokumen	8.240.800,00	2 Dokumen	5.240.800,00	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	1 Laporan	42.225.304,00	1 Laporan	46.135.622,00	1 Laporan	42.225.304,00	1 Laporan	49.724.856,00	1 Laporan	42.225.304,00	
JUMLAH				4.591.031.746,00		4.682.852.381,00		4.774.673.016,00		4.866.493.651,00		4.958.314.286,00	Rs. Bilai



4.3 Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan Program Prioritas, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pendanaan kegiatan Operasional yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kute Siantan bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Indikator kinerja Kecamatan Kute Siantan yang Outcamenya berkaitan langsung dengan kegiatan/sub kegiatan dapat dilihat pada tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel. 4. 4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN		KET
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pembangunan Kawasan Strategis Nasional dengan Pertimbangan Daerah Perbatasan, Pulau-pulau Terluar dan Daerah Terpencil, Kecamatan Kute Siantan merupakan salah satu Kecamatan Perbatasan
			2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	6	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada diKecamatan/Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Khususnya dan Provinsi Kepri Pada Umumnya
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah kecamatan	7	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan/Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pengendalian Keamanan, Ketertiban danKenyamanan Lingkungan	8	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum/Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah/Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			11	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	
			12	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	



4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029 merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Kute Siantan dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja Kecamatan Kute Siantan yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 4.5 di bawah ini :

Tabel. 4. 5
Indikator Kinerja Utama (IKU)
KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2025-2029

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Predikat SAKIP	Predikat	B	B	B	BB	BB	A	
2	Nilai SAKIP	Angka/Point	60,10	65,34	68,45	70,85	75,25	80,25	
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	Persen	70,45	75,25	76,45	78,36	79,20	80,25	

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Kecamatan Kute Siantan terus berupaya meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, berbagai program dan kegiatan telah dijalankan



untuk mendukung fungsi utama kecamatan, seperti koordinasi pemerintahan desa, pembinaan masyarakat, dan penyediaan layanan administrasi. Melalui optimalisasi sumber daya dan penerapan teknologi informasi, penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Kute Siantan menunjukkan perbaikan yang signifikan, baik dalam hal efisiensi waktu maupun peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025– 2029, Kecamatan Kute Siantan berperan penting dalam melaksanakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menjadi tolak ukur utama keberhasilan pembangunan daerah. IKK yang diampu oleh Kecamatan Kute Siantan mencerminkan peran strategis lembaga ini dalam memastikan keterpaduan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pelayanan. Melalui pelaksanaan IKK tersebut, Kecamatan Kute Siantan tidak hanya menjamin konsistensi dan akuntabilitas dokumen perencanaan, tetapi juga mendorong terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada hasil, berbasis data, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika wilayah.

Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat, telah menghasilkan capaian positif dalam menjaga ketertiban umum serta memperkuat sinergi pembangunan. Pendekatan partisipatif juga diterapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan wilayah. Keberhasilan ini mencerminkan komitmen Kecamatan Kute Siantan untuk terus meningkatkan kinerja di seluruh bidang urusan, guna mewujudkan pelayanan yang lebih baik dan pembangunan yang inklusif.



Berikut adalah tabel indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

Tabel. 4. 6
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
KECAMATAN KUTE SIANTAN TAHUN 2025-2029

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP	BAIK	60,10	65,34	68,45	70,85	75,25	80,25	80,25
2	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Wilayah Kecamatan	BAIK	70,45	75,25	76,45	78,36	79,20	80,25	80,25
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	77,77	76,69	76,82	77,45	77,75	77,90	80,00	80,00

Tabel ini mencerminkan komitmen Kecamatan Kute Siantan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Kute Siantan periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dokumen ini mencerminkan komitmen Kecamatan Kute Siantan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan mendorong pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan berbagai potensi yang dimiliki serta mengantisipasi tantangan yang ada, Renstra ini diharapkan menjadi landasan yang kokoh bagi tercapainya tujuan pembangunan sesuai visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Melalui kolaborasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan terus dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Renstra ini. Dengan semangat kerja sama dan komitmen yang tinggi, Kecamatan Kute Siantan optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah kecamatan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Kute Siantan berkewajiban menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum



dalam dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Kute Siantan yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025- 2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Kute Siantan yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran kemudian hasil dari Rencana Kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kecamatan Kute Siantan.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kute Siantan Tahun 2025-2029 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan.

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas demi mewujudkan Kejayaan Anambas yang berkeadilan.

Payalaman, 04 September 2025

Plt. CAMAT KUTE SIANTAN,


YULIANA, S.Pi
Penata Tk. I/III.d
NIP. 197808312002122007